

# **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN**

**(STUDI KASUS 35 KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH**

**TAHUN 2003-2007)**



## **SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi  
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

**ADIT AGUS PRASTYO**

**NIM. C2B005146**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2010**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Penyusun : Adit Agus Prastyo

Nomor Induk Mahasiswa : C2B005146

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / IESP

Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN  
(STUDI KASUS 35 KABUPATEN/KOTA DI  
JAWA TENGAH TAHUN 2003-2007)**

Dosen Pembimbing : Drs. H Edy Yusuf AG, MSc. Ph. D.

Semarang, 30 Juli 2010

Dosen Pembimbing,

(Drs. H Edy Yusuf AG, MSc. Ph. D.)

NIP. 19581121984031002

**PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN**

Nama Mahasiswa : Adit Agus Prastyo

Nomor Induk Mahasiswa : C2B005146

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / IESP

Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN  
(STUDI KASUS 35 KABUPATEN/KOTA DI  
JAWA TENGAH TAHUN 2003-2007**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 18 Agustus 2010**

Tim Penguji :

1. Drs. H Edy Yusuf AG, MSc. Ph. D. (.....)

2. Drs. Nugroho SBM, MT. (.....)

3. Dra. Hj. Tri Wahyu R, MSi. (.....)

### PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Adit Agus Prastyo, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI JAWA TENGAH (STUDI KASUS 35 KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2003-2007)”**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai tulisan hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 30 Juli 2010

Yang membuat pernyataan,

(Adit Agus Prastyo)

NIM : C2B005146

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Kegagalan hanya terjadi jika kita menyerah”

(Lessing)

“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan atau diperbuatnya”

(Ali Bin Abi Thalib)

Skripsi ini Kupersembahkan Teruntuk Ibu, Ayah, dan Adik Tercinta

## ABSTRAK

Kemiskinan merupakan salah satu masalah dalam perekonomian yang kompleks dan multidimensional. Oleh karenanya perlu dicari solusi untuk mengatasi atau paling tidak mengurangi tingkat kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah dari tahun 2003 hingga tahun 2007.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah panel data dengan pendekatan efek tetap (*fixed effect model*), dan menggunakan jenis data sekunder. Penggunaan dummy wilayah dalam penelitian ini adalah untuk melihat variasi tingkat kemiskinan di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

*Adjusted R<sup>2</sup>* cukup tinggi yaitu 0.982677. Sedangkan hasil dari penelitian ini adalah bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat kemiskinan. Oleh karenanya perkembangan pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan tingkat pengangguran patut menjadi pertimbangan untuk mengatasi masalah kemiskinan.

**Kata Kunci:** tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, pengangguran.

### **ABSTRACT**

*Poverty is one of the biggest economic which is complex and multidimensional. Because of that, it is important in finding solution to eliminate or at least to reduce poverty. This study examines the impact of economic growth, minimum wages, education, and unemployment in poverty from 2003 to 2007.*

*Method which is used in this study is data panel with fixed effect model approach and secondary data. Dummy areas is used to catch poverty variations in 35 regencies in Central Java.*

*Adjusted  $R^2$  is high enough at 0.982677. While result of this study shows that the number of economic growth, minimum wages, education, and unemployment have significant influence to poverty, so the development of those has to be considered to eliminate poverty.*

***Keywords: poverty, economic growth, minimum wages, education, unemployment.***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah (Studi Kasus 35 Kabupaten/kota Di Jawa Tengah Tahun 2003-2007)*”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana Strata S1 Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini banyak mengalami hambatan, namun berkat doa, bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, yang telah memberikan mukjizat serta kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. M. Chabachib, M.Si. Akt, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
3. Drs. H Edy Yusuf AG, MSc, Ph. D. selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, motivasi, masukan-masukan dan saran yang sangat berguna bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Ahma Hendra Setiawan, SE, M.Si selaku dosen wali yang banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi selama penulis menjalani studi di Fakultas Ekonomi UNDIP
5. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Ekonomi UNDIP, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Ibu tersayang Tuminem dan Ayah tercinta Sukidi, atas curahan kasih sayang, untaian doa dan motivasi yang tiada henti dan sangat besar yang tak ternilai harganya bagiku. Terimakasih atas semua yang telah engkau berikan. Anakmu ini tidak akan mengecewakanmu.
7. Adik tercinta Dita Novia Sari atas dukungan dan doa yang telah engkau berikan. Semoga dirimu dapat menjadi lebih baik dari kakakmu ini.

8. Para Sahabat, Aldino, Wijayanto, Dimas, Dina, Hanung, Nia, kontrakan Jogja (makasih tumpangnya).
9. Tomy, Yuda, Adit-Anggi (makasih bimbingannya), topek, Nirwan, Nugi, Ery, Tia, Desibon, Datin, Wulan, Oie, Dian. Aku pengen kumpul-kumpul sama kalian lagi.
10. Teman-teman IESP 05 tercinta : Peby, Bagus, Erwin, Shabun, endy, usrok, fathul, dodot, Plie, Fifi, Nana, Meme, Ska, Puri, Mbak Nuning, Gabrot, Prima, Lia, dan seluruh teman-teman IESP'05 yang tidak dapat disebutkan satu per satu, tetap berjuang teman dan terima kasih banyak atas kerjasama dan bantuannya selama ini.
11. Pak Robikan dan Pak Munawir, terima kasih telah menyediakan tempat yang nyaman selama di Semarang.
12. Teman-teman KKN Desa Krasak atas doa dan dukungannya.
13. Terakhir untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kelemahan, Oleh karena itu, penulis tak lupa mengharapkan saran dan kritik atas skripsi ini.

Semarang, 30 Juli 2010

Penulis

Adit Agus Prastyo

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN SKRIPSI .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAKSI .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	13
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	15
1.4 Sistematika Penulisan .....	16

<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
2.1	Landasan Teori .....	18
2.1.1	Kemiskinan .....	18
2.1.2	Ukuran Kemiskinan .....	21
2.1.3	Pertumbuhan ekonomi .....	24
2.1.4	Hubungan Tingkat Kemiskinan Dengan Pertumbuhan Ekonomi .....	29
2.1.5	Upah .....	30
2.1.6	Teori Upah Minimum .....	32
2.1.7	Hubungan Tingkat Kemiskinan Dengan Upah Minimum .....	37
2.1.8	Pendidikan .....	38
2.1.9	Pembangunan Modal Manusia Melalui Pendidikan .....	40
2.1.10	Hubungan Tingkat Kemiskinan Dengan Pendidikan .....	42
2.1.11	Pengangguran .....	44
2.1.11.1	Dampak Pengangguran .....	46
2.1.12	Hubungan Tingkat Kemiskinan Dengan Pengangguran .....	47
2.2	Penelitian Terdahulu .....	47
2.3	Kerangka Pemikiran Teoritis .....	50

2.4 Hipotesis .....	52
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Penelitian	53
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	54
3.3 Metode Analisis .....	55
3.3.1 Estimasi Model Regresi Dengan Panel Data.....	57
3.3.2 Estimasi Model Regresi Panel Data Dengan Penggunaan Variabel Dummy .....	58
3.4 Pengujian Penyimpangan Asumsi Klasik .....	62
3.5 Uji Statistik .....	65
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>69</b>
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian .....	69
4.1.1 Keadaan Geografis .....	69
4.1.2 Kemiskinan.....	70
4.1.3 Pertumbuhan Ekonomi .....	73
4.1.4 Upah Minimum .....	75
4.1.5 Pendidikan .....	77
4.1.6 Pengangguran .....	80
4.2 Hasil Uji Penyimpangan Asumsi Klasik .....	82

4.3.1 Uji Multikolinearitas .....	82
4.3.2 Uji Autokorelasi .....	83
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas .....	83
4.3.4 Uji Normalitas .....	84
4.3 Hasil Pengujian Statistik Analisis Regresi.....	85
4.2.1 Koefisien Determinasi (Uji $R^2$ ) .....	85
4.2.2 Pengujian Signifikansi Simultan (Uji F) .....	86
4.2.3 Pengujian Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) .....	87
4.4 Interpretasi Hasil dan Pembahasan .....	89
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
5.1 Kesimpulan .....	95
5.2 Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>102</b>

## DAFTAR TABEL

		<b>Halaman</b>
Tabel 1.1	Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2003-2008 (persen) .....	5
Tabel 1.2	Jumlah Kabupaten Kabupaten/kota di Jawa Tengah Berdasarkan Rata-Rata Tingkat Kemiskinan Tahun 2003-2007 .....	6
Tabel 1.3	Perkembangan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2007 .....	9
Tabel 4.1	Alokasi APBD Untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2003-2007 .....	70
Tabel 4.2	Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2003-2007 (persen) .....	72
Tabel 4.3	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2003-2007 (persen) .....	74
Tabel 4.4	Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2007 (rupiah) .....	76
Tabel 4.5	Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas yang lulus SMA Keatas Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2007 (jiwa) .....	78
Tabel 4.6	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2007 (persen) .....	81
Tabel 4.7	$R^2$ Hasil <i>Auxiliary Regression</i> Pengaruh Pertumbuhan	di

	Ekonomi, Upah Minimum, Pendidikan, dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2003-2007 .....	82
Tabel 4.8	Hasil <i>Breusch-Godfrey</i> (BG) .....	83
Tabel 4.9	Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji White).....	84
Tabel 4.10	Nilai t-statistik dan Koefisien Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pendidikan, dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2003-2007 .....	88

## DAFTAR GAMBAR

		<b>Halaman</b>
Gambar 1.1	Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2003-2007 (persen) .....	2
Gambar 1.2	Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2003-2007 (persen) .....	4
Gambar 1.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2003-2008 (persen) .....	7
Gambar 1.4	Tingkat Pengangguran di Jawa Tengah Tahun 2003-2008 (persen) .....	12
Gambar 2.2	Penetapan Upah Minimum di Pasar Momopsoni .....	36
Gambar 2.3	Mekanisme Transmisi Investasi Modal Manusia .....	41
Gambar 2.4	Kerangka Pemikiran .....	50
Gambar 4.1	Hasil Uji Jarque-Bera .....	85

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran A	Data Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pendidikan, dan Pengangguran Menurut Kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2003-2007 .....	103
Lampiran B	Hasil Regresi Utama Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pendidikan, dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2003-2007 .....	112
Lampiran C	Uji Asumsi Klasik Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pendidikan, dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2003-2007.....	114

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. 1 Latar Belakang Masalah

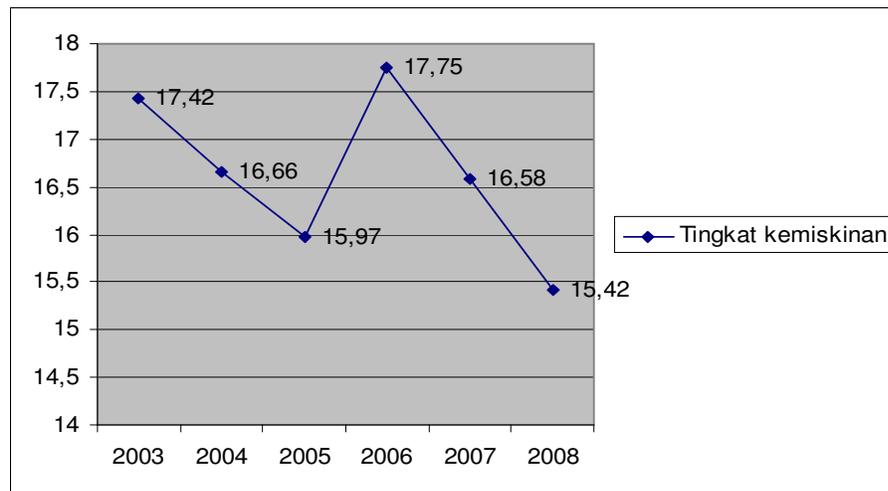
Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (M. Nasir, dkk 2008).

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti *proper*, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, Chambers (dalam Chriswardani Suryawati, 2005) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *intergrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4)

ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Menurut BPS (2007), seseorang masuk dalam kriteria miskin jika pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan.

**Gambar 1.1**

**Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2003-2008 (persen)**



Sumber: BPS, Statistik Indonesia, 2009

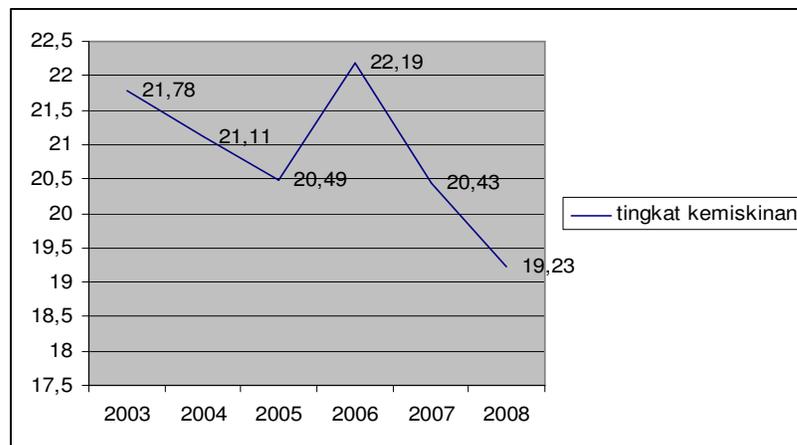
Tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode tahun 2003 hingga tahun 2008 mengalami kecenderungan yang menurun, seperti terlihat pada Gambar 1.1. Pada periode tahun 2003 sampai 2005 tingkat kemiskinan turun dari sebesar 17,42 persen pada tahun 2003 menjadi 15,97 pada tahun 2005. Namun di tahun 2006 kenaikan tingkat kemiskinan relatif tinggi menjadi 17,75 persen terjadi karena harga barang-barang kebutuhan pokok selama periode tersebut naik tinggi, yang digambarkan oleh inflasi umum sebesar 17,95 persen, akibatnya penduduk yang tergolong tidak miskin namun penghasilannya berada disekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin. Terjadi penurunan tingkat kemiskinan yang cukup signifikan pada periode tahun 2006 hingga 2008, dari

17,75 persen di tahun 2006 menjadi 15,42 persen di tahun 2008, bahkan penurunan ini melebihi penurunan di tahun 2005 yang mencapai 15,97 persen (BPS, 2009).

Usaha pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan sangatlah serius, bahkan merupakan salah satu program prioritas, termasuk bagi pemerintah provinsi Jawa Tengah. Upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah dilaksanakan melalui lima pilar yang disebut “*Grand Strategy*” . *Pertama*, perluasan kesempatan kerja, ditujukan untuk menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan. *Kedua*, pemberdayaan masyarakat, dilakukan untuk mempercepat kelembagaan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat dan memperluas partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin kehormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar. *Ketiga*, peningkatan kapasitas, dilakukan untuk pengembangan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat miskin agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan. *Keempat*, perlindungan sosial, dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan yang disebabkan antara lain oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial. *Kelima*, kemitraan regional, dilakukan untuk pengembangan dan menata ulang hubungan dan kerjasama lokal, regional, nasional, dan internasional guna mendukung pelaksanaan ke empat strategi diatas (Bappeda Jateng, 2007).

Hasil dari upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah memperlihatkan pengaruh yang positif. Hal ini terlihat dari tingkat kemiskinan yang mengalami pola yang menurun. Gambar 1.2 menunjukkan kecenderungan penurunan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2003 tingkat kemiskinan sebesar 21,78 persen dan turun menjadi 20,49 persen di tahun 2005, tetapi di tahun 2006 meningkat menjadi 22,19 persen, kemudian turun menjadi 20,43 persen di tahun 2007 dan 19,23 persen di tahun 2008.

**Gambar 1.2**  
**Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2003-2008 (persen)**



Sumber: BPS, Jawa Tengah Dalam Angka, berbagai Tahun Terbitan

Keberhasilan provinsi Jawa Tengah dalam menanggulangi kemiskinan belum sepenuhnya berhasil. Ini terlihat dari tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi, yaitu angka diatas *hard core* atau diatas 10 persen. Tabel 1.1 menunjukkan rata-rata tingkat kemiskinan di enam provinsi di pulau Jawa. Rata-rata tingkat kemiskinan Jawa Tengah masih yang paling tinggi dibanding dengan provinsi lain di pulau Jawa, yaitu sebesar 20,87 persen. Peringkat kedua ditempati oleh Provinsi Jawa Timur dengan rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 20,09

persen, peringkat ketiga ditempati oleh Provinsi DI Yogyakarta dengan rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 19,07 persen, peringkat keempat ditempati oleh Provinsi Banten dengan rata-rata tingkat kemiskinan 9,00 persen dan yang terakhir ditempati oleh Provinsi DKI Jakarta dengan rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 3,95 persen.

**Tabel 1.1**  
**Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2003-2008**  
**(persen)**

<b>Provinsi</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>Rata-rata</b>
DKI Jakarta	3,42	3,18	3,61	4,57	4,61	4,29	3,95
Jawa Barat	12,90	12,10	13,06	14,49	13,55	13,01	13,19
<b>Jawa Tengah</b>	<b>21,78</b>	<b>21,11</b>	<b>20,49</b>	<b>22,19</b>	<b>20,43</b>	<b>19,23</b>	<b>20,87</b>
DI Yogyakarta	19,86	19,14	18,95	19,15	18,99	18,32	19,07
Jawa Timur	20,93	20,08	19,95	21,09	19,98	18,51	20,09
Banten	9,56	8,58	8,86	9,79	9,07	8,15	9,00

Sumber: BPS, Statistik Indonesia, 2009

Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah merupakan tingkat kemiskinan agregat dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Tabel 1.2 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di 35 kabupaten di Jawa Tengah masih tidak merata, dan sebagian besar tingkat kemiskinannya masih tinggi. Ada empat kota yang memiliki tingkat kemiskinan dibawah 10 persen, yaitu Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Salatiga, sedangkan yang lainnya diatas 10 persen. Ini mengindikasikan usaha pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan belum merata ke seluruh kabupaten/kota. Untuk itu perlu dicari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di seluruh kabupaten/kota, sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi tiap kabupaten/kota dalam usaha mengatasi kemiskinan.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Kabupaten/kota di Jawa Tengah Berdasarkan Rata-Rata Tingkat Kemiskinan Tahun 2003-2007**

Rata-Rata Tingkat Kemiskinan	Jumlah Kabupaten/kota
0%-10%	4
11%-20%	11
21%-30%	16
31%-40%	4

Sumber: BPS, Statistik Indonesia, 2009

Proses pembangunan memerlukan pendapatan nasional yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Di banyak negara syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan yang tetap adalah pertumbuhan ekonomi . pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan tetapi biasanya pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang dibutuhkan, walaupun begitu pertumbuhan ekonomi yang bagus pun menjadi tidak akan berarti bagi penurunan masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan pemerataan pendapatan (Wongdesmiwati (2009)).

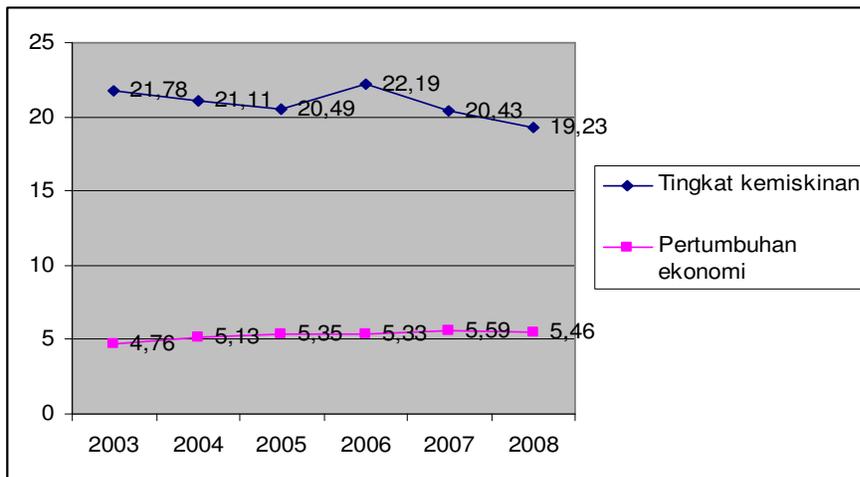
Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin. Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja yaitu sektor pertanian atau sektor yang padat kerja. Adapun secara tidak langsung, diperlukan pemerintah yang cukup efektif mendistribusikan

manfaat pertumbuhan yang mungkin didapatkan dari sektor modern seperti jasa yang padat modal (Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, 2008).

Penelitian yang dilakukan Wongdesmiwati menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan. Untuk menurunkan tingkat kemiskinan maka pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan.

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa sampai tahun 2007 laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dari 4,70 persen di tahun 2003 menjadi 5,46 persen di tahun 2008. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi ini diikuti dengan kecenderungan penurunan penduduk miskin dari tahun ke tahun. yakni 21,78 persen di tahun 2003 dan turun menjadi 20,49 persen di tahun 2005, tetapi di tahun 2006 meningkat menjadi 22,19 persen kemudian turun menjadi 20,43 di tahun 2007 dan 19,23 persen di tahun 2008.

**Gambar 1.3**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2003-2008 (persen)**



Sumber : BPS, Statistik Indonesia, Berbagai Tahun Terbitan

Kebijakan upah minimum juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Gagasan upah minimum yang sudah dimulai dan dikembangkan sejak awal tahun 1970-an bertujuan untuk mengusahakan agar dalam jangka panjang besarnya upah minimum paling sedikit dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum (KHM), sehingga diharapkan dapat menjamin tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup beserta keluarga dan sekaligus dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja dan kesejahteraan buruh (Sonny Sumarsono, 2003).

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999, Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Yang dimaksud dengan tunjangan tetap adalah suatu jumlah imbalan yang diterima pekerja secara tetap dan teratur pembayarannya, yang tidak dikaitkan dengan kehadiran ataupun pencapaian prestasi tertentu. Kebijakan penetapan upah minimum oleh pemerintah adalah kebijakan yang diterapkan dengan tujuan sebagai jaring pengaman terhadap pekerja atau buruh agar tidak dieksploitasi dalam bekerja dan mendapat upah yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum (KHM). Jika kebutuhan hidaup minimum dapat terpenuhi, maka kesejahteraan pekerja meningkatkan dan terbebas dari masalah kemiskinan .

Peraturan Menteri Nomor 17, tahun 2005 (Per-17/Men/VIII/2005), KHL merupakan standar kebutuhan yang harus dipenuhi seorang pekerja atau buruh lajang untuk dapat hidup layak, baik fisik, non fisik, dan sosial selama satu bulan. Seorang pekerja dianggap hidup layak jika upahnya mampu memenuhi kebutuhan 3000 kalori per hari. Oleh karena itu, KHL menjadi salah satu pertimbangan

dalam penetapan upah minimum. Ada 7 komponen KHL yang selalu dihitung, yaitu makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, serta rekreasi dan tabungan.

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa sampai tahun 2008 tingkat upah minimum Provinsi di Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2003 tingkat upah minimum sebesar 340.400 rupiah, kemudian naik menjadi 365.000 rupiah di tahun 2004 dan 390.000 rupiah di tahun 2005. Kenaikan tertinggi terjadi di tahun 2008, dari 500.000 rupiah di tahun 2007 menjadi 574.000 rupiah.

**Tabel 1.3**  
**Perkembangan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2003-2007 (Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>UMP</b>
2003	340.400
2004	365.000
2005	390.000
2006	450.000
2007	500.000
2008	574.000

Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka Berbagai Tahun Terbitan, Diolah

Faktor lain yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah pendidikan. Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan

meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan memperkerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan juga akan bersedia memberikan gaji yang lebih tinggi bagi yang bersangkutan. Di sektor informal seperti pertanian, peningkatan ketrampilan dan keahlian tenaga kerja akan mampu meningkatkan hasil pertanian, karena tenaga kerja yang terampil mampu bekerja lebih efisien. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Rasidin K. Sitepu dan Bonar M. Sinaga, 2004).

Undang-Undang Dasar RI 1945 Pasal 31 ayat 2 menyebutkan bahwa setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Konsekuensinya, pemerintah pusat dan daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD

dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat, agar mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat manusia. Mendidik dan memberikan pengetahuan berarti menggapai masa depan. Hal tersebut harusnya menjadi semangat untuk terus melakukan upaya mencerdaskan bangsa (Criswardani Suryawati, 2005).

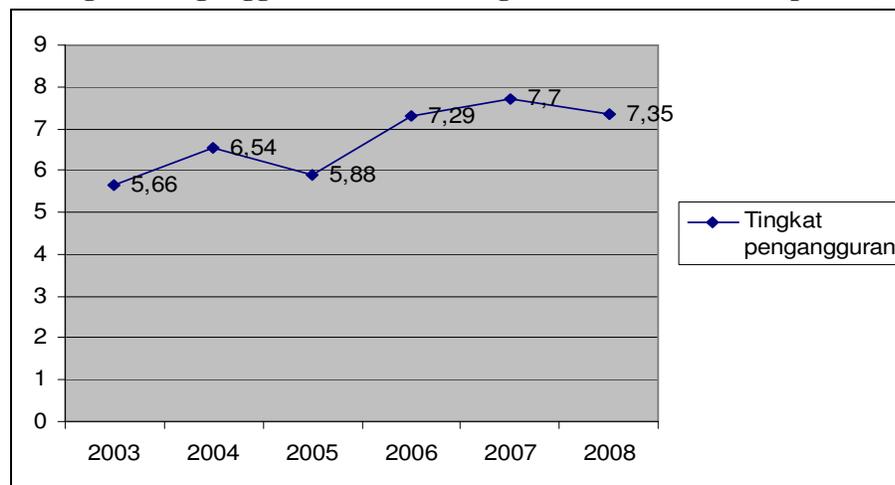
Penelitian yang dilakukan oleh Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti menemukan bahwa pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan sangat penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

Pembangunan bidang pendidikan di Jawa Tengah selama ini telah dilakukan melalui upaya pengembangan dan relevansi pendidikan sesuai dengan tujuan perkembangan iptek dan kebutuhan pasar kerja, dengan memperhatikan sistem pendidikan nasional yang berjalan dan juga sasaran komitmen-komitmen Internasional di bidang pendidikan. Akses masyarakat terhadap fasilitas-fasilitas pendidikan dapat dilihat dari angka partisipasi kasar (APK) SD/MI 107,17 % menjadi 109,12 %, SMP/MTS meningkat dari 71,55 % menjadi 77,68 % dan proporsi penduduk buta huruf dari 13,27 % menjadi 10,46 % masing-masing pada tahun 2003 dan tahun 2007 (Bappeda Jateng, 2008).

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah pengangguran. Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat

adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat terwujud. Pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat, dan itu akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah tercapai. Semakin turunnya tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan (Sadono Sukirno, 2003).

**Gambar 1.4**  
**Tingkat Pengangguran di Jawa Tengah Tahun 2003-2008 (persen)**



Sumber: BPS, Jawa Tengah Dalam Angka, Berbagai Tahun Terbitan

Gambar 1.4 menunjukkan tingkat pengangguran di Jawa Tengah tergolong masih tinggi, dimana masih dalam kisaran diatas 5 persen. Tingkat pengangguran di Jawa Tengah tidak stabil, mengalami beberapa kali fase naik turun. Pada tahun 2003, tingkat pengangguran sebesar 5,66 persen, kemudian naik menjadi 6,54 persen di tahun 2004. Peningkatan tingkat pengangguran terjadi secara beruntun dari tahun 2006 dan tahun 2007, dari 5,88 di tahun 2005 menjadi 7,29 di tahun 2006 dan 7,7 di tahun 2007.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, di Provinsi Jawa Tengah dalam periode 2003-2007 terjadi fenomena penurunan tingkat kemiskinan, tetapi rata-rata tingkat kemiskinannya dibanding provinsi-provinsi lain di pulau Jawa adalah yang paling tinggi. Belum meratanya hasil usaha pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan ke seluruh kabupaten/kota menjadi penyebabnya, padahal dampak kemiskinan sangat buruk terhadap perekonomian. Untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di seluruh kabupaten/kota, sehingga dapat digunakan sebagai dasar kebijakan bagi tiap kabupaten/kota dalam usaha mengatasi kemiskinan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2003 hingga tahun 2008 mengalami periode yang relatif baik karena mengalami trend yang menurun dari 21,78 persen di tahun 2003 menjadi 19,23 persen di tahun 2008, meskipun sempat mengalami kenaikan di tahun 2006 menjadi 22,16. Rata-rata tingkat kemiskinan Jawa Tengah masih yang paling tinggi dibanding dengan provinsi lain di pulau Jawa. Penyebabnya adalah belum meratanya hasil dari usaha pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan keseluruhan kabupaten/kota. Untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di seluruh kabupaten/kota agar dapat diketahui faktor-faktor yang perlu dipacu untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan disertai pemerataan hasil

pertumbuhan keseluruhan sektor usaha sangat dibutuhkan dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi Maka untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan.

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah upah minimum. Upah minimum ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak yang dibutuhkan pekerja dengan harapan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja sehingga tingkat kemiskinan akan berkurang.

Selain itu, pendidikan dan pengangguran juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja dan memperbesar peluang kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih layak dan memperoleh kemakmuran. Pendapatan masyarakat maksimum tercapai saat perekonomian mencapai kesempatan kerja penuh. Semakin meningkatnya tingkat pengangguran akan semakin mengurangi pendapatan masyarakat yang berakibat naiknya tingkat kemiskinan.

Atas dasar permasalahan diatas maka persoalan penelitian yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan?
2. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap tingkat kemiskinan?
3. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan?
4. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan?

5. Bagaimana perbedaan kondisi tingkat kemiskinan di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan**

#### **Tujuan penelitian :**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan.
2. Menganalisis perbedaan kondisi tingkat kemiskinan di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

#### **Kegunaan penelitian :**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada:

1. Pengambil Kebijakan

Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna di dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang perlu dipacu untuk mengatasi masalah kemiskinan.

2. Ilmu Pengetahuan

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan. Manfaat khusus bagi ilmu

pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian mengenai tingkat kemiskinan dengan mengungkap secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhinya.

#### **1. 4 Sistematika Penulisan**

##### **Bab I Pendahuluan**

Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah yang terdiri dari tingkat kemiskinan di Indonesia serta fenomena tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

##### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Menyajikan landasan teori tentang, teori kemiskinan, pengertian pertumbuhan ekonomi, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan, teori upah minimum, hubungan antara upah minimum dan tingkat kemiskinan, teori pendidikan, hubungan antara pendidikan dan tingkat kemiskinan, teori pengangguran, hubungan antara pengangguran dan tingkat kemiskinan. Disamping itu pada bab ini juga terdapat penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis yang dapat diambil.

##### **Bab III Metode Penelitian**

Pada bab ini dipaparkan tentang metode penelitian yang meliputi variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, dan metode analisis.

**Bab IV Hasil dan Pembahasan**

Pada bab ini dipaparkan tentang deskripsi obyek penelitian, yaitu kondisi tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan pengangguran di Jawa Tengah, analisis data dan pembahasan.

**Bab V Penutup**

Pada bab ini disampaikan kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Kemiskinan**

Dalam arti *proper*, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas. Chambers (dalam Chriswardani Suryawati, 2005) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu intergrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidak berdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri (Chriswardani Suryawati, 2005). Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

- a. Kemiskinan absolut, kondiai dimana seseorang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja.

- b. Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
- c. Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
- d. Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

- a. Kemiskinan alamiah, berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.
- b. Kemiskinan buatan, lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak mendapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.

Menurut Nasikun dalam Chriswardani Suryawati (2005), beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:

- a. *Policy induces processes*, yaitu proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan, diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi relitanya justru melestarikan.

- b. *Socio-economic dualism*, negara bekas koloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.
- c. *Population growth*, perspektif yang didasari oleh teori Malthus, bahwa pertumbuhan penduduk seperti deret ukur sedangkan pertumbuhan pangan seperti deret hitung.
- d. *Resources management and the environment*, adalah unsur mismanagement sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.
- e. *Natural cycle and processes*, kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggalkan lahan kritis, dimana lahan itu jika turun hujan akan terjadi banjir, akan tetapi jika musim kemarau kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.
- f. *The marginalization of woman*, peminggiran kaum perempuan karena masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang lebih rendah dari laki-laki.
- g. *Cultural and ethnic factors*, bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya pada pola konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.
- h. *Exploitative intermediation*, keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir.

- i. *Inetrnal political fragmentation and civil stratfe*, suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan.
- j. *Interbational processe*, bekerjanya sistem internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi miskin.

### **2.1.2 Ukuran Kemiskinan**

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu 2100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada dilapisan bawah), dan konsumsi nonmakanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan). Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku untuk semua umur, jenis kelamin, dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis penduduk, ukuran ini sering disebut dengan garis kemiskinan. Penduduk yang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan dikatakan dalam kondisi miskin.

Menurut Sayogyo, tingkat kemiskinan didasarkan jumlah rupiah pengeluaran rumah tangga yang disetarakan dengan jumlah kilogram konsumsi beras per orang per tahun dan dibagi wilayah pedesaan dan perkotaan (Criswardani Suryawati, 2005).

Daerah pedesaan:

- a. Miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 320 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
- b. Miskin sekali, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 240 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
- c. Paling miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 180 kg nilai tukar beras per orang per tahun.

Daerah perkotaan:

- a. Miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 480 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
- b. Miskin sekali: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 380 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
- c. Paling miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 270 kg nilai tukar beras per orang per tahun.

Bank Dunia mengukur garis kemiskinan berdasarkan pada pendapatan seseorang. Seseorang yang memiliki pendapatan kurang dari US\$ 1 per hari masuk dalam kategori miskin (Criswardani Suryawati, 2005).

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), mengukur kemiskinan berdasarkan dua kriteria (Criswardani Suryawati, 2005), yaitu:

- a) Kriteria Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) yaitu keluarga yang tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan perintah agama dengan baik, minimum makan dua kali sehari, membeli lebih dari satu stel pakaian per

orang per tahun, lantai rumah bersemen lebih dari 80%, dan berobat ke Puskesmas bila sakit.

- b) Kriteria Keluarga Sejahtera 1 (KS 1) yaitu keluarga yang tidak berkemampuan untuk melaksanakan perintah agama dengan baik, minimal satu kali per minggu makan daging/telur/ikan, membeli pakaian satu stel per tahun, rata-rata luas lantai rumah 8 meter per segi per anggota keluarga, tidak ada anggota keluarga umur 10 sampai 60 tahun yang buta huruf, semua anak berumur antara 5 sampai 15 tahun bersekolah, satu dari anggota keluarga mempunyai penghasilan rutin atau tetap, dan tidak ada yang sakit selama tiga bulan.

Ukuran kemiskinan menurut *Foster-Greer-Thorbecke* (dalam Todaro, 2004):

$$P\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z-y_i}{z} \right]^\alpha \dots\dots\dots (2.1)$$

Dimana:

$$\alpha = 0, 1, 2$$

$z$  = Garis kemiskinan

$y_i$  = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada

di bawah garis kemiskinan ( $i=1, 2, 3, \dots, q$ ),  $y_i < z$ .

$q$  = Banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.

$n$  = Jumlah penduduk.

Jika:

- $\alpha = 0$ , maka diperoleh *Head Count Index* ( $P_0$ ), yaitu persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.
- $\alpha = 1$ , maka diperoleh *Poverty Gap Index* ( $P_1$ ), yaitu indeks kedalaman kemiskinan, merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indek, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- $\alpha = 2$ , maka diperoleh *Poverty Severity* ( $P_2$ ), yaitu indeks keparahan kemiskinan, yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indek, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

### 2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya yang ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Simon Kuznetz dalam Todaro, 2004). Menurut Robinson Tarigan (2004) pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*value added*) yang terjadi di wilayah tersebut.

Menurut pandangan kaum historis, diantaranya Friedrich List dan Rostow, pertumbuhan ekonomi merupakan tahapan proses tumbuhnya perekonomian mulai dari perekonomian bersifat tradisional yang bergerak di sektor pertanian dimana produksi bersifat subsisten, hingga akhirnya menuju perekonomian modern yang didominasi oleh sektor industri manufaktur. Menurut pandangan ekonom klasik, Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus dan John Straurt Mill, maupun ekonom neo klasik, Robert Solow dan Trevor Swan, mengemukakan bahwa pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, dan (4) tingkat teknologi yang digunakan. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya (Mudrajad Kuncoro, 2003). Sedangkan menurut Schumpeter, faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah proses inovasi, dan pelakunya adalah inovator atau wiraswasta (*entrepreneur*). Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya inovasi oleh para *entrepreneur*.

Menurut Boediono, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita dimana ada dua sisi yang perlu diperhatikan, yaitu sisi output totalnya (GDP) dan sisi jumlah penduduknya. Output per kapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk (Sri Aditya, 2010).

Menurut Nafziger (Sri Aditya, 2010), pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan produksi suatu negara atau kenaikan pendapatan per kapita suatu negara, sedangkan menurut Kuznets (Todaro, 2003), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.

Menurut Todaro (2003), ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu :

1. **Akumulasi modal** termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fiskal, dan sumber daya manusia (*human resources*). Akumulasi modal akan terjadi jika ada sebagian dari pendapatan sekarang di tabung yang kemudian diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk memperbesar output di masa-masa mendatang. Investasi juga harus disertai dengan investasi infrastruktur, yakni berupa jalan, listrik, air bersih, fasilitas sanitasi, fasilitas komunikasi, demi menunjang aktivitas ekonomi produktif. Investasi dalam pembinaan sumber daya manusia bermuara pada peningkatan kualitas modal manusia, yang pada akhirnya dapat berdampak positif terhadap angka produksi.
2. **Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja.** Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angka kerja (*labor force*) secara tradisional telah dianggap sebagai faktor yang positif dalam

merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak angkatan kerja semakin produktif tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestiknya.

3. **Kemajuan Teknologi.** Kemajuan teknologi disebabkan oleh teknologi cara-cara baru dan cara-cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional. Ada 3 klasifikasi kemajuan teknologi, yakni :

- a. Kemajuan teknologi yang bersifat netral, terjadi jika tingkat output yang dicapai lebih tinggi pada kuantitas dan kombinasi-kombinasi input yang sama.
- b. Kemajuan teknologi yang bersifat hemat tenaga kerja (*labor saving*) atau hemat modal (*capital saving*), yaitu tingkat output yang lebih tinggi bisa dicapai dengan jumlah tenaga kerja atau input modal yang sama
- c. Kemajuan teknologi yang meningkatkan modal, terjadi jika penggunaan teknologi tersebut memungkinkan kita memanfaatkan barang modal yang ada secara lebih produktif.

Menurut Nugraheni, pengukuran akan kemajuan sebuah perekonomian memerlukan alat ukur yang tepat, beberapa alat pengukur pertumbuhan ekonomi antara lain yaitu (Sri Aditya, 2010):

a. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB), atau di tingkat regional disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), merupakan jumlah barang dan jasa akhir yang

dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar. Baik PDB atau PDRB merupakan ukuran yang global sifatnya, dan bukan merupakan alat ukur pertumbuhan ekonomi yang tepat, karena belum dapat mencerminkan kesejahteraan penduduk yang sesungguhnya, padahal sesungguhnya kesejahteraan harus dinikmati oleh setiap penduduk di negara atau daerah yang bersangkutan.

b. Produk Domestik Bruto Per kapita/Pendapatan Per kapita

Produk domestik bruto per kapita atau produk domestik regional bruto per kapita pada skala daerah dapat digunakan sebagai pengukur pertumbuhan ekonomi yang lebih baik karena lebih tepat mencerminkan kesejahteraan penduduk suatu negara daripada nilai PDB atau PDRB saja. Produk domestik bruto per kapita baik di tingkat nasional maupun di daerah adalah jumlah PDB nasional atau PRDB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk di negara maupun di daerah yang bersangkutan, atau dapat disebut juga sebagai PDB atau PDRB rata-rata.

Bank Dunia menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB), bukan PDB sebagai alat ukur perkembangan ekonomi suatu negara. yaitu dengan memperhitungkan pendapatan bersih dan faktor produksi milik orang asing.

Walaupun PDB atau PNB per kapita merupakan alat pengukur yang lebih baik. namun tetap belum mencerminkan kesejahteraan penduduk secara tepat, karena PDB rata-rata tidak mencerminkan kesejahteraan ekonomi yang sesungguhnya dirasakan oleh setiap orang di suatu negara. Dapat saja angka-angka rata-rata tersebut tinggi, namun sesungguhnya ada penduduk atau

sekolompok penduduk yang tidak menerima pendapatan sama sekali. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan unsur distribusi pendapatan di antara penduduk suatu negara. Dengan memperhatikan unsur distribusi pendapatan itu, maka PDB atau PNB per kapita yang tinggi disertai distribusi pendapatan yang lebih merata akan mencerminkan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik daripada bila pendapatan per kapitanya tinggi namun ada distribusi pendapatan yang tidak merata.

Meskipun demikian, demi sederhananya pengukuran, pendapatan per kapita tetap merupakan alat pengukur yang unggul dibanding dengan alat-alat pengukur yang lain.

#### **2.1.4 Hubungan Tingkat Kemiskinan Dengan Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Syaratnya adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut menyebar disetiap golongan masyarakat, termasuk di golongan penduduk miskin. (Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, 2007).

Penelitian yang dilakukan Wongdesmiwati (2009), menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan. Hubungan ini menunjukkan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2007)

### **2.1. 5 Upah**

Upah pada dasarnya merupakan sumber utama penghasilan seseorang, oleh karenanya upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dengan wajar. Sebagai imbalan terhadap tenaga dan pikiran yang diberikan pekerja kepada pengusaha, maka pengusaha akan memberikan kepada pekerja dalam bentuk upah. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya. Jadi upah berfungsi sebagai imbalan atas usaha kerja yang diberikan seseorang tersebut kepada pengusaha. Upah dibayar oleh pengusaha sesuai atau sama dengan usaha kerja (produktivitas) yang diberikan kepada pengusaha (Sonny Sumarsono, 2003).

Upah merupakan salah satu unsur untuk menentukan harga pokok dalam perusahaan, karena ketidaktepatan dalam menentukan besarnya upah akan sangat merugikan perusahaan. Oleh karenanya ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat upah yaitu sebagai berikut :

#### **1. Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja**

Untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tinggi dan jumlah tenaga kerjanya langka, maka upah cenderung tinggi, sedangkan untuk jabatan-jabatan yang mempunyai penawaran yang melimpah, upahnya cenderung turun.

## 2. Organisasi Buruh

Ada tidaknya organisasi buruh serta kuat lemahnya organisasi buruh akan mempengaruhi tingkat upah. Adanya serikat buruh yang kuat akan meningkatkan tingkat upah demikian pula sebaliknya.

## 3. Kemampuan untuk Membayar

Pemberian upah tergantung pada kemampuan membayar dari perusahaan. Bagi perusahaan, upah merupakan salah satu komponen biaya produksi, tingginya upah akan mengakibatkan tingginya biaya produksi, yang pada akhirnya akan mengurangi keuntungan.

## 4. Produktivitas Kerja

Upah sebenarnya merupakan imbalan atas prestasi kerja karyawan. Semakin tinggi prestasi kerja karyawan, maka semakin besar upah yang mereka terima. Prestasi kerja ini dinyatakan sebagai produktivitas kerja.

## 5. Biaya Hidup

Dikota besar dimana biaya hidup tinggi, upah kerja cenderung tinggi. Biaya hidup juga merupakan batas penerimaan upah dari karyawan.

## 6. Pemerintah

Pemerintah dengan peraturan-peraturannya mempengaruhi tinggi rendahnya upah. Peraturan tentang upah umumnya merupakan batas bawah dari tingkat upah yang harus dibayarkan.

### **2.1.6 Teori Upah Minimum**

Dalam pasar tenaga kerja sangat penting untuk menetapkan besarnya upah yang harus dibayarkan perusahaan pada pekerjanya. Undang-undang upah minimum menetapkan harga terendah tenaga kerja yang harus dibayarkan (Mankiw, 2006). Menurut Kaufman (2000), tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin.

Kebijakan upah minimum di Indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 dan UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Yang dimaksud dengan tunjangan tetap adalah suatu jumlah imbalan yang diterima pekerja secara tetap dan teratur pembayarannya, yang tidak dikaitkan dengan kehadiran ataupun pencapaian prestasi tertentu. Tujuan dari penetapan upah minimum adalah untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja. Beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan termasuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja tanpa menafikkan produktifitas perusahaan dan kemajuannya, termasuk juga pertimbangan mengenai kondisi ekonomi secara umum.

Menurut Hasanuddin Rachman (2005), Tujuan penetapan upah minimum dapat dibedakan secara mikro dan makro. Secara mikro tujuan penetapan upah minimum yaitu (a) sebagai jaring pengaman agar upah tidak merosot, (b)

mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di perusahaan, dan (c) meningkatkan penghasilan pekerja pada tingkat paling bawah. Sedangkan secara makro, penetapan upah minimum bertujuan untuk (a) pemerataan pendapatan, (b) peningkatan daya beli pekerja dan perluasan kesempatan kerja, (c) perubahan struktur biaya industri sektoral, (d) peningkatan produktivitas kerja nasional, (d) peningkatan etos dan disiplin kerja, dan (e) memperlancar komunikasi pekerja dan pengusaha dalam rangka hubungan bipartite.

Pada awalnya upah minimum ditentukan secara terpusat oleh Departemen Tenaga Kerja untuk region atau wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Dalam perkembangan otonomi daerah, kemudian mulai tahun 2001 upah minimum ditetapkan oleh masing-masing provinsi. Upah Minimum ini dapat dibedakan menjadi upah minimum regional dan upah minimum sektoral.

#### 1. Upah Minimum Regional

Upah Minimum Regional adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap bagi seorang pekerja tingkat paling bawah dan bermasa kerja kurang dari satu tahun yang berlaku di suatu daerah tertentu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja : PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, upah minimum regional (UMR) dibedakan menjadi dua, yaitu Upah Minimum Regional Tingkat I (UMR Tk. I) dan Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk. II). Namun sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KEP-226/MEN/2000) tentang perubahan pada pasal 1, 3, 4, 8, 11, 20 dan 21 PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, maka istilah Upah Minimum Regional Tingkat I (UMR Tk. I) diubah menjadi Upah Minimum

Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Regional Tingkat I I (UMR Tk. II) diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten /Kota (UM kab/kota).

## 2. Upah Minimum Sektoral

Upah minimum sektoral adalah upah yang berlaku dalam suatu provinsi berdasarkan kemampuan sektor. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja : Per-01/MEN/1999 tentang upah minimum, upah minimum sektoral dibedakan menjadi Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I (UMSR Tk. I) dan Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I I (UMSR Tk. II).

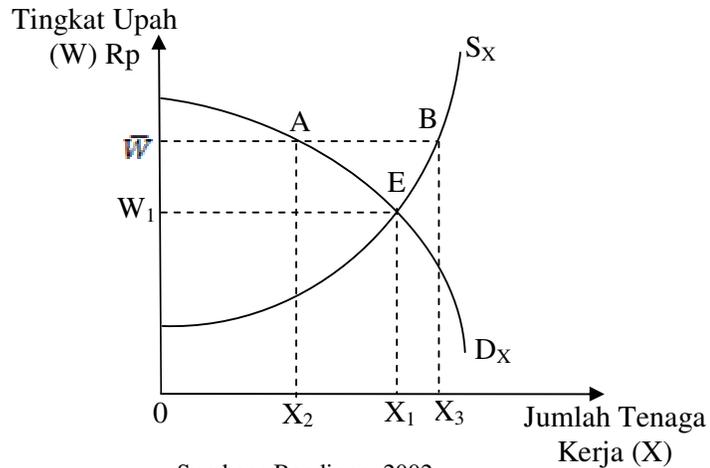
Dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KEP-226/MEN/2000) tentang perubahan pada pasal 1, 3, 4, 8, 11, 20 dan 21 PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, maka terjadi perubahan istilah Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I (UMSR Tk. I) menjadi Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat II (UMSR Tk. II) diubah menjadi Upah Minimum Sektoral Kabupaten /Kota (UMS kab/kota).

Variabel-variabel yang mempengaruhi upah minimum regional (UMR) Tingkat I dan II sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999, adalah sebagai berikut : kebutuhan hidup minimum (KHM), indeks harga konsumen (IHK), kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan, tingkat upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah, kondisi pasar kerja, dan tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan per kapita.

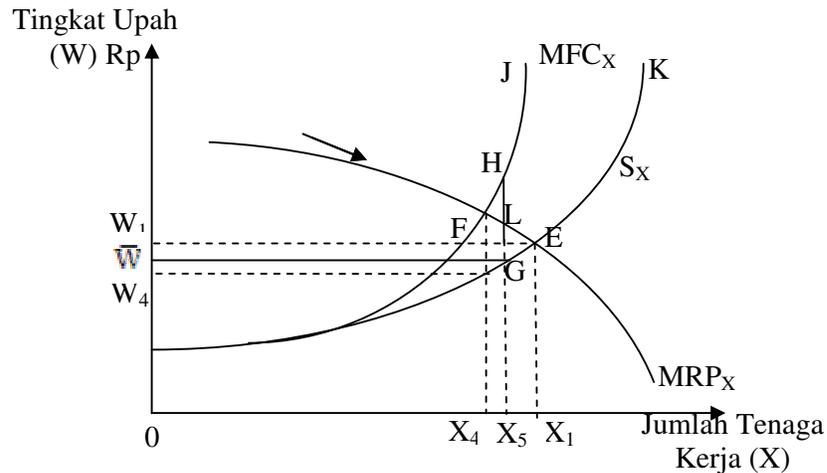
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-17/Men/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak serta sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 88 (4) tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa besaran upah minimum antara lain didasarkan pada tahap pencapaian KHL, pertumbuhan PDRB, produktivitas, dan mempertimbangkan keberadaan sektor marjinal (usaha yang paling tidak mampu). Pada pelaksanaannya, pertimbangan pada usaha tidak mampu ternyata belum dapat dioperasionalkan.

Gambar 2.1 menjelaskan peraturan upah minimum yang dikenakan pada pasar tenaga kerja yang bersifat persaingan sempurna. Tingkat upah minimum yang berlaku sebelum ada peraturan upah minimum adalah  $W_1$  dan jumlah orang yang dipekerjakan adalah  $OX_1$  (yaitu, keseimbangan terjadi pada E). Dengan dikenakannya peraturan upah minimum  $\bar{W}$  maka tingkat upah tidak bisa turun dibawah  $\bar{W}$  dan ini mengakibatkan permintaan akan tenaga kerja turun menjadi  $OX_2$  sedang jumlah tenaga kerja yang menawarkan diri adalah  $OX_3$ . Ini berarti bahwa tingkat upah yang lebih tinggi tersebut harus dibayar dengan ongkos sosial berupa  $X_2X_1$  orang yang semula bekerja sekarang kehilangan pekerjaan dan  $X_1X_3$  orang baru yang mencari pekerjaan. Jadi jumlah pengangguran total adalah  $X_2X_3$  orang =  $(X_2X_1 + X_1X_3)$  orang (Boediono, 2002).

**Gambar 2.1**  
**Penetapan Upah Minimum di Pasar Tenaga Kerja**



**Gambar 2.2**  
**Penetapan Upah Minimum di Pasar Monopsoni**



Apabila pasar tenaga kerja yang terjadi adalah pasar monopsoni, dimana hanya ada sebuah perusahaan sebagai satu-satunya tempat bekerja bagi orang-orang di daerah tersebut, posisi keseimbangan sebelum ada peraturan upah minimum bukan pada titik E tetapi pada titik F (Gambar 2.2). Dengan tingkat upah  $W_4$  dan jumlah orang dipekerjakan  $OX_4$ . Seandainya upah minimum

$\bar{w}$  ditetapkan, konsekuensi dari peraturan ini adalah bahwa kurva penawaran akan tenaga kerja tidak lagi kurva  $S_x$  yang lama, tetapi menjadi garis patah  $\bar{w}GEK$  (karena upah tidak bisa turun di bawah  $\bar{w}$ ). Kurva penawaran input adalah kurva AFC input tersebut. Jadi  $\bar{w}GEK$  adalah kurva AFC bagi tenaga kerja setelah peraturan upah minimum dikenakan. Sesuai dengan dalil hubungan antara AC dan MC, maka kurva MFC bagi tenaga kerja setelah penerapan peraturan upah minimum adalah garis patah  $\bar{w}GLHJ$ . Garis inilah yang dilihat oleh perusahaan sebagai MFC perusahaan. Posisi yang paling baik (keuntungan maksimum) bagi perusahaan adalah apabila  $MFC = MRP$ . Posisi ini adalah titik L (dimana  $MFC_x$ , yaitu  $\bar{w}GLHJ$ , berpotongan dengan  $MRP_x$ ). Jadi dengan dikenakannya peraturan upah minimum tingkat upah adalah  $\bar{w}$  dan jumlah orang yang dipekerjakan adalah  $OX_5$ . Perhatikan bahwa dalam pasar monopsoni penerapan upah minimum dapat meningkatkan tingkat upah dan jumlah lapangan kerja yang tersedia.

### 2.1.7 Hubungan Tingkat Kemiskinan Dengan Upah Minimum

Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Semakin meningkat tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat dan sehingga terbebas dari kemiskinan (Kaufman 2000).

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999, tujuan dari penetapan upah minimum adalah untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi

pekerja. Beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan termasuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja tanpa menafikkan produktifitas perusahaan dan kemajuannya, termasuk juga pertimbangan mengenai kondisi ekonomi secara umum.

### **2.1.8 Pendidikan**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sepiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Jalur pendidikan:

1. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang tersetruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah dan tinggi. jenjang pendidikan formal:
  - a. Pendidikan dasar, merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

- b. Pendidikan menengah, merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
  - c. Pendidikan tinggi, merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doctor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
2. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan ini meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, dan lain-lain.
  3. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluargadan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan formal diakui

sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan setandar nasional pendidikan.

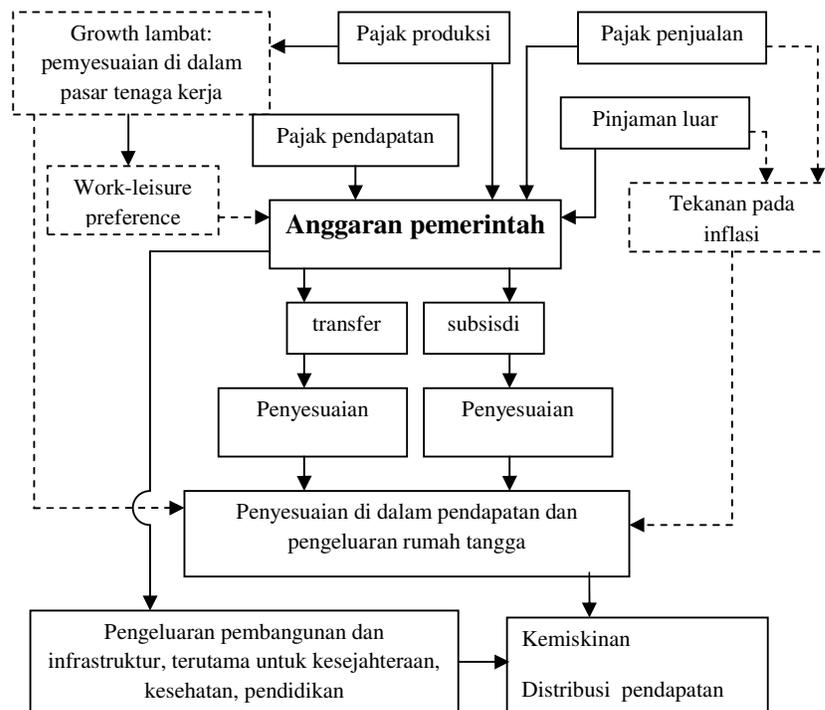
Dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable development*), sektor pendidikan memainkan peranan yang sangat strategis khususnya dalam mendorong akumulasi modal yang dapat mendukung proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya. Secara definisi, seperti yang dilansir dalam *World Commision on Environmental and Development*, 1997 dalam McKeown (dalam Dian Satria, 2008), bahwa *sustainable development* adalah: “*Sustainable development is development that meets the needs of the present without comprimising the ability of future generations to meet their own needs.*” Dalam konteks ini, pendidikan dianggap sebagai alat untuk mencapai target yang berkelanjutan, karena dengan pendidikan aktivitas pembangunan dapat tercapai, sehingga peluang untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan akan lebih baik. Di sisi lain, dengan pendidikan, usaha pembangunan yang lebih hijau (*greener development*) dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan juga mudah tercapai.

### **2.1.9 Pembangunan Modal Manusia Melalui Pendidikan**

Analisis atas investasi dalam bidang pendidikan menyatu dalam pendekatan modal manusia. Modal manusia (*human capital*) adalah istilah yang sering digunakan oleh para ekonom untuk pendidikan, kesehatan, dan kapasitas manusia yang lain yang dapat meningkatkan produktivitas jika hal-hal tersebut ditingkatkan. Pendidikan memainkan kunci dalam membentuk kemampuan

sebuah negara untuk menyerap teknologi moderen dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2004).

**Gambar 2.3**  
**Mekanisme Transmisi Investasi Modal Manusia**



(Sumber: Rasidin K. Sitepu dan Bonar S. Sinaga, 2005)

Mekanisme transmisi investasi modal manusia untuk mempengaruhi distribusi pendapatan dan kemiskinan di tampilan pada Gambar 2.3 Dari sisi pengeluaran, penurunan kemiskinan dan redistribusi pendapatan dapat dilakukan dengan tiga instrumen alokasi anggaran pemerintah, yaitu (1) subsidi langsung atau subsidi individu yang ditargetkan pada rumah tangga berpendapatan rendah, (2) subsidi harga, subsidi komoditi yang digunakan oleh rumah tangga terutama untuk kebutuhan pokok, dan (3) pengeluaran langsung pemerintah terhadap pelayanan publik dan infrastruktur, terutama pada sektor kesejahteraan, kesehatan

dan pendidikan, yang diutamakan untuk rumahtangga berpendapatan rendah (Rasidin K. Sitepu dan Bonar M. Sinaga, 2004).

Pembangunan modal manusia diyakini tidak hanya dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan, namun juga berperan sentral mempengaruhi distribusi pendapatan di suatu perekonomian. (Becker, 1964; Schultz, 1981 dalam Dian Satria, 2008). Logika ini jugalah yang mendorong strategi pengentasan kemiskinan yang bersentral pada pentingnya pembangunan modal manusia (*human capital*). Romer, 1986; Lucas, 1988 (Dian Satria, 2008), menjelaskan bahwa modal manusia tidak hanya diidentifikasi sebagai kontributor kunci dalam pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan, namun juga mendorong tujuan pembangunan untuk meningkatkan *human freedom* secara umum. Selain itu, fokus perkembangan global saat ini yang dicatat dalam *millennium development goals* juga telah memposisikan perbaikan kualitas modal manusia dalam prioritas yang utama.

#### **2.1.10 Hubungan Tingkat Kemiskinan Dengan Pendidikan**

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan

meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan memperkerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan juga akan bersedia memberikan gaji yang lebih tinggi bagi yang bersangkutan. Di sektor informal seperti pertanian, peningkatan ketrampilan dan keahlian tenaga kerja akan mampu meningkatkan hasil pertanian, karena tenaga kerja yang terampil mampu bekerja lebih efisien. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Rasidin K dan Bonar M, 2004).

Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat manusia. Mendidik dan memberikan pengetahuan berarti menggapai masa depan. Hal tersebut harusnya menjadi semangat untuk terus melakukan upaya mencerdaskan bangsa (Criswardani Suryawati, 2005).

Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008), di dalam penelitiannya menemukan bahwa pendidikan yang diukur dengan jumlah penduduk yang lulus pendidikan SMP, SMA, dan diploma memiliki berpengaruh besar dan signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Ini mencerminkan bahwa pembangunan modal manusia (*human capital*) melalui pendidikan merupakan determinan penting untuk menurunkan jumlah penduduk miskin.

### 2.1.11 Pengangguran

Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan (Sadono Sukirno, 1999). Jenis-jenis pengangguran:

#### 1) Jenis-Jenis Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya:

##### a. Pengangguran Alamiah

Pengangguran yang berlaku pada tingkat kesempatan kerja penuh. Kesempatan kerja penuh adalah keadaan dimana sekitar 95 persen dari angkatan kerja dalam suatu waktu sepenuhnya bekerja. Pengangguran sebanyak lima persen inilah yang dinamakan sebagai pengangguran alamiah.

##### b. Pengangguran Friksional

Suatu jenis pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seorang pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya dan mencari kerja yang lebih baik atau lebih sesuai dengan keinginannya.

##### c. Pengangguran Struktural

Pengangguran yang diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi. Tiga sumber utama yang menjadi penyebab berlakunya pengangguran struktural adalah:

- 1) Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang semakin maju membuat permintaan barang dari industri yang memproduksi barang-barang yang kuno menurun dan akhirnya tutup dan pekerja

di industri ini akan menganggur. Pengangguran ini disebut juga sebagai pengangguran teknologi.

- 2) Kemunduran yang disebabkan oleh adanya persaingan dari luar negeri atau daerah lain. Persaingan dari luar negeri yang mampu menghasilkan produk yang lebih baik dan lebih murah akan membuat permintaan akan barang lokal menurun. Industri lokal yang tidak mampu bersaing akan bangkrut sehingga timbul pengangguran.
- 3) Kemunduran perkembangan ekonomi suatu kawasan sebagai akibat dari pertumbuhan yang pesat dikawasan lain.

#### d. Pengangguran Konjungtur

Pengangguran yang melebihi pengangguran alamiah. Pada umumnya pengangguran konjungtur berlaku sebagai akibat pengurangan dalam permintaan agregat. Penurunan permintaan agregat mengakibatkan perusahaan mengurangi jumlah pekerja atau gulung tikar, sehingga muncul pengangguran konjungtur.

### 2) Jenis-Jenis Pengangguran Berdasarkan Cirinya:

#### a. Pengangguran Terbuka

Pengangguran ini tercipta sebagai akibat penambahan pertumbuhan kesempatan kerja yang lebih rendah daripada pertumbuhan tenaga kerja, akibatnya banyak tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran terbuka adalah penduduk yang telah masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki

pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

b. Pengangguran tersembunyi

Keadaan dimana suatu jenis kegiatan ekonomi dijalankan oleh tenaga kerja yang jumlahnya melebihi dari yang diperlukan.

c. Pengangguran Musiman

Keadaan pengangguran pada masa-masa tertentu dalam satu tahun. Pengangguran ini biasanya terjadi di sektor pertanian. Petani akan menganggur saat menunggu masa tanam dan saat jeda antara musim tanam dan musim panen.

d. Setengah Menganggur

Keadaan dimana seseorang bekerja dibawah jam kerja normal. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), di Indonesia jam kerja normal adalah 35 jam seminggu, jadi pekerja yang bekerja di bawah 35 jam seminggu masuk dalam golongan setengah menganggur.

#### **2.1.11.1 Dampak Pengangguran:**

Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat tercapai. Pengangguran berdampak mengurangi pendapatan masyarakat, sehingga akan menurunkan tingkat kemakmuran yang mereka capai.

Ditinjau dari sudut individu, pengangguran menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial kepada yang mengalaminya. Keadaan pendapatan menyebabkan para penganggur harus mengurangi pengeluarannya. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang (Sadono Sukirno (2004).

### **2.1.12 Hubungan Tingkat Kemiskinan Dengan Pengangguran**

Menurut Sadono Sukirno (2004), efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Wongdesmiwati (2009) dalam jurnal “Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia: Analisis Ekonometrika”, menggunakan metode analisis regresi berganda dari tahun 1990 hingga tahun 2004. model yang digunakan adalah  $Log Y_i = \beta_0 + \beta_1 Log X_{1i} + \beta_2 Log X_{2i} + \beta_3 Log X_{3i} + \beta_4 Log X_{4i} + \beta_5 Log X_{5i} +$

$\beta_6 \text{Log}X6_i + \varepsilon_i$ . Dimana  $Y_i$  adalah jumlah penduduk miskin,  $X1_i$  adalah jumlah penduduk Indonesia per tahun,  $X2_i$  adalah PDB yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi,  $X3_i$  adalah angka harapan hidup,  $X4_i$  adalah persentase angka melek huruf,  $X5_i$  adalah persentase penggunaan listrik,  $X6_i$  adalah persentase konsumsi makanan. Hasil dari penelitian ini adalah variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel angka melek huruf berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Variabel angka harapan hidup, penggunaan listrik, dan konsumsi makanan tidak signifikan berpengaruh terhadap penduduk miskin.

Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008) dalam jurnal "Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin", menggunakan metode estimasi ekonometrika data panel untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Data yang digunakan adalah data dari 26 provinsi tahun 1995 sampai dengan tahun 2005. Model yang digunakan  $POV_{ij} = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{ij} + \beta_2 POP_{ij} + \beta_3 AGRISHR_{ij} + \beta_4 INDTRSHR_{ij} + \beta_5 INFLASI_{ij} + \beta_6 SMP_{ij} + \beta_7 SMA_{ij} + \beta_8 DIPLM_{ij} + \beta_9 DUMMYKRISIS_{ij} + \varepsilon_{ij}$  dimana  $POV$  adalah jumlah penduduk miskin,  $PDRB$  adalah pertumbuhan ekonomi,  $POP$  adalah jumlah penduduk,  $AGRISHR$  adalah pangsa sektor pertanian,  $INDTRSHR$  adalah pangsa sektor industri,  $INFLASI$  adalah tingkat inflasi tahunan,  $SMP$  adalah jumlah lulusan sekolah SMP,  $SMA$  adalah jumlah lulusan SMA,  $DIPLM$  adalah jumlah lulusan sekolah setingkat diploma, dan

*DUMMYKRISISI* adalah dummy krisis ekonomi. Hasil dari penelitian ini adalah variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin walaupun dengan pengaruh yang relative kecil. Variabel inflasi dan variabel populasi penduduk berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan variabel pangsa sektor pertanian dan pangsa sektor industri secara signifikan berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin. Variabel yang berpengaruh negatif paling besar dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin adalah pendidikan.

Rasidin K. Sitepu dan Bonar M. Sinaga (2005), dalam jurnal “Dampak Investasi Sumberdaya Manusia Terhadap Petumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia: Pendekatan Model Computable General Equilibrium”, menggunakan metode *Computable General Equilibrium (CGE)*, dan *Foster-Greer-Thorbecke method*. Variabel yang digunakan adalah tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, investasi pendidikan, dan investasi kesehatan. Hasil dari penelitian ini adalah investasi sumberdaya manusia berdampak langsung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Investasi kesehatan dan investasi pendidikan sama-sama dapat mengurangi kemiskinan, namun investasi kesehatan memiliki persentase yang lebih besar.

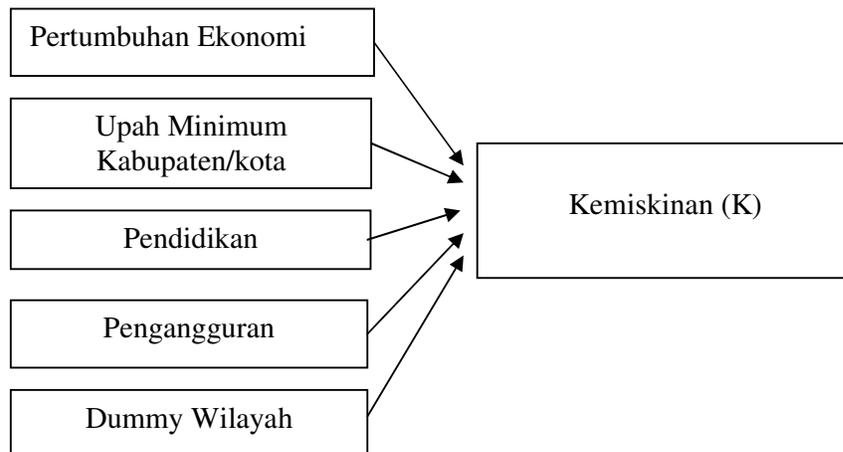
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak sepenuhnya sama dengan variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu. Variabel yang sama adalah variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel pendidikan., sedangkan variabel upah minimum dan pengangguran diperoleh dari teori. Variabel upah minimum dan pengangguran merupakan variabel baru yang tidak ada pada

penelitian terdahulu. Pada penelitian terdahulu terdapat beberapa variabel yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, tetapi tidak digunakan dalam penelitian ini dengan alasan keterbatasan data dan beberapa variabel sudah terwakili oleh variabel yang lain.

### 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Untuk memudahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan serta untuk memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, berikut ini gambar kerangka pemikiran yang skematis:

**Gambar 2.4**  
**Kerangka Pemikiran**



Dari kerangka pemikiran tersebut dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah indikator yang lazim digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Tambahan pendapatan dari aktivitas ekonomi akan berpengaruh terhadap kemiskinan jika

mampu menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk golongan miskin. Semakin banyak golongan miskin memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi maka kesejahteraannya akan meningkat dan lepas dari kemiskinan.

Tujuan utama penetapan upah minimum adalah meningkatkan kesejahteraan dan melindungi pekerja. Upah minimum mencerminkan pendapatan yang diterima pekerja, adanya kenaikan tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Penetapan upah minimum yang pantas dan tepat diharapkan mendorong penduduk yang berada dibawah kemiskinan mampu hidup layak sehingga tingkat kemiskinan akan turun.

Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan yang akan meningkatkan produktifitas. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka pengetahuan dan keahliannya akan meningkat, sehingga akan mendorong produktivitas kerjanya. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya.

Pengangguran akan menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial kepada yang mengalaminya. Kondisi menganggur menyebabkan seseorang tidak memiliki pendapatan, akibatnya kesejahteraan yang telah dicapai akan semakin merosot. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang terjebak dalam kemiskinan.

## 2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara/kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang sebenarnya masih harus diuji secara empiris. Hipotesis yang dimaksud merupakan dugaan yang mungkin benar atau mungkin salah.

Dengan mengacu pada dasar pemikiran yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian dibidang ini, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2003-2007.
2. Diduga variabel upah minimum kabupaten/kota di Jawa Tengah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2003-2007.
3. Diduga variabel pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2003-2007.
4. Diduga variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2003-2007.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan memudahkan pemahaman terhadap variabel-variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini, maka perlu dirumuskan definisi operasional sebagai berikut :

1. Tingkat kemiskinan (K) adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2003-2007 (dalam satuan persen), Data diambil dari BPS.
2. Pertumbuhan Ekonomi Regional (Y), dinyatakan sebagai perubahan PDRB atas dasar harga konstan di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2003-2007 (dalam satuan persen) yang dihitung dengan menggunakan rumus:

$$Y_{it} = \frac{PDRB_{it} - PDRB_{it-1}}{PDRB_{it-1}} \times 100\% \dots\dots\dots (3.1)$$

Dimana:

- $Y_{it}$  = Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota i, tahun t  
 $PDRB_{it}$  = PDRB ADHK Kabupaten/kota i tahun t  
 $PDRB_{it-1}$  = PDRB ADHK Kabupaten/kota i tahun t-1

3. Upah minimum kabupaten/kota (U) adalah upah minimum yang berlaku di daerah kabupaten/kota, yang diterima oleh pekerja per bulan (BPS, 2008). UMK yang digunakan dalam penelitian ini adalah upah minimum yang

berlaku di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2003-2007 yang diukur dalam satuan rupiah. Data diambil dari BPS.

4. Pendidikan (PD), dinyatakan sebagai penduduk berumur 10 tahun keatas yang lulus pendidikan terakhir SMA keatas di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2003-2007, yang diukur dalam satuan jiwa. Data diambil dari BPS.
5. Tingkat pengangguran terbuka (P) adalah persentase penduduk dalam angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2003-2007 yang diukur dalam satuan persen (BPS, 2008). Data diambil dari BPS.

### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya diambil dari Badan Statistik, dokumen-dokumen perusahaan atau organisasi, surat kabar dan majalah, ataupun publikasi lainnya (Marzuki, 2005). Data sekunder yang digunakan adalah data deret waktu (*time-series data*) untuk kurun waktu tahun 2003-2007 serta data kerat lintang (*cross-section data*) yang meliputi 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Secara umum data-data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah. Informasi lain bersumber dari studi kepustakaan lain berupa jurnal ilmiah dan buku-buku teks.

### 3.3 Metode Analisis

Studi ini menggunakan analisis panel data (*pooled data*) sebagai alat pengolahan data dengan menggunakan program Eviews 6. Analisis dengan menggunakan panel data adalah kombinasi antara deret waktu (*time-series data*) dan kerat lintang (*cross-section data*). Dalam model data panel persamaan model dengan menggunakan data *cross-section* dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \mu_i ; i = 1, 2, \dots, N \dots\dots\dots (3.2)$$

dimana N adalah banyaknya data cross-section

Sedangkan persamaan model dengan time-series adalah :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \mu_t ; t = 1, 2, \dots, T \dots\dots\dots (3.3)$$

dimana T adalah banyaknya data time-series

Mengingat data panel merupakan gabungan dari time-series dan cross-section,

maka model dapat ditulis dengan :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \mu_{it} \dots\dots\dots (3.4)$$

$$i = 1, 2, \dots, N ; t = 1, 2, \dots, T$$

dimana :

N = banyaknya observasi

T = banyaknya waktu

N × T = banyaknya data panel

Menurut Hsiao (2003) dan Baltagi (2005), keunggulan penggunaan data panel dibandingkan deret waktu dan kerat lintang adalah :

- a. Estimasi data panel dapat menunjukkan adanya heterogenitas dalam tiap individu.

- b. Dengan data panel, data lebih informatif, lebih bervariasi, mengurangi kolinearitas antar variabel, meningkatkan derajat kebebasan (*degree of freedom*), dan lebih efisien.
- c. Studi data panel lebih memuaskan untuk menentukan perubahan dinamis dibandingkan dengan studi berulang dari *cross-section*.
- d. Data panel lebih mendeteksi dan mengukur efek yang secara sederhana tidak dapat diukur oleh data *times series* atau *cross-section*, misalnya efek dari upah minimum.
- e. Data panel membantu studi untuk menganalisis perilaku yang lebih kompleks, misalnya fenomena skala ekonomi dan perubahan teknologi.
- f. Data panel dapat meminimalkan bias yang dihasilkan oleh agregasi individu atau perusahaan karena unit data lebih banyak.

Dalam analisis model data panel dikenal, dua macam pendekatan yang terdiri dari pendekatan efek tetap (*fixed effect*), dan pendekatan efek acak (*random effect*). Kedua pendekatan yang dilakukan dalam analisis data panel dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendekatan efek tetap (*Fixed effect*)

Salah satu kesulitan prosedur data panel adalah bahwa asumsi intersep dan slope yang konsisten sulit terpenuhi. Untuk mengatasi hal tersebut, yang dilakukan dalam data panel adalah dengan memasukkan variabel boneka (*dummy variable*) untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda baik lintas unit cross section maupun antar waktu (*time-series*).

Pendekatan dengan memasukkan variabel boneka ini dikenal dengan sebutan model efek tetap (*fixed effect*) atau *Least Square Dummy Variable* (LSDV).

## 2. Pendekatan efek acak (*Random effect*)

Keputusan untuk memasukkan variabel boneka dalam model efek tetap (*fixed effect*) tak dapat dipungkiri akan dapat menimbulkan konsekuensi (*trade off*). Penambahan variabel boneka ini akan dapat mengurangi banyaknya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi. Model data panel yang di dalamnya melibatkan korelasi antar error term karena berubahnya waktu karena berbedanya observasi dapat diatasi dengan pendekatan model komponen error (*error component model*) atau disebut juga model efek acak (*random effect*).

### 3.3.1 Estimasi Model Regresi Dengan Panel Data

Penelitian mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di kabupaten/kota di Jawa Tengah, menggunakan data time-series selama 5 (empat) tahun terakhir yang diwakili data tahunan dari 2003-2007 dan data cross-section sebanyak 35 data mewakili kabupaten/kota di Jawa Tengah. Kombinasi atau *pooling* menghasilkan 175 observasi dengan fungsi persamaan data panelnya dapat dituliskan sebagai berikut :

$$K_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 Y_{it} + \alpha_2 U_{it} + \alpha_3 PD_{it} + \alpha_4 P_{it} + u_{it} \dots\dots\dots (3.5)$$

dimana :

- $K$  = tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah  
 $Y$  = pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah  
 $U$  = upah minimum kabupaten/kota di Jawa Tengah  
 $PD$  = pendidikan kabupaten/kota di Jawa Tengah  
 $P$  = tingkat pengangguran kabupaten/kota di Jawa Tengah  
 $\alpha_0$  = intersep  
 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  = koefisien regresi variabel bebas  
 $\mu_{it}$  = komponen error di waktu t untuk unit cross section i  
 $i$  = 1, 2, 3, ..., 35 (data cross-section kabupaten/kota di Jawa Tengah)  
 $t$  = 1, 2, 3, 4 (data time-series, tahun 2003-2007)

### 3.3.2 Estimasi Model Regresi Panel Data Dengan Penggunaan Variabel Dummy

Gujarati (2003) menjelaskan bahwa estimasi model regresi panel data dengan pendekatan *fixed effect* tergantung pada asumsi yang digunakan pada intersep, koefisien slope, dan *error term*, dimana ada beberapa kemungkinan asumsi yaitu :

- a. Asumsi bahwa intersep dan koefisien slope adalah konstan antar waktu (*time*) dan ruang (*space*) dan *error term* mencakup perbedaan sepanjang waktu dan individu.
- b. Koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu.

- c. Koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu dan waktu.
- d. Seluruh koefisien (intersep dan koefisien slope) bervariasi antar individu.
- e. Intersep sebagaimana koefisien slope bervariasi antar individu dan waktu.

Dalam penelitian ini pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2003-2007 digunakan asumsi FEM yang kedua, yaitu koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu. Dalam hal ini, intersep dari masing-masing individu diasumsikan memiliki perbedaan yang disebabkan oleh karakteristik khusus yang dimiliki oleh masing-masing individu. Bentuk model *fixed effect* adalah dengan memasukkan variabel dummy untuk menyatakan perbedaan intersep. Ketika variabel dummy digunakan untuk mengestimasi *fixed effect*, maka persamaan tersebut disebut sebagai *Least Square Dummy Variabel (LSDV)*. Penelitian ini menggunakan dummy wilayah, untuk melihat perbedaan perkembangan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah selama 5 tahun periode penelitian (tahun 2003-2007) dimana Kota Semarang sebagai wilayah acuan (*benchmark*). Alasan penggunaan Kota Semarang sebagai *benchmark* adalah Kota Semarang memiliki rata-rata tingkat kemiskinan kabupaten/kota terendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah.

Setelah memasukkan variabel dummy wilayah pada persamaan 3.5 maka model persamaannya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
K_{it} = & \alpha_0 + \alpha_1 Y_{it} + \alpha_2 U_{it} + \alpha_3 PD_{it} + \alpha_4 P_{it} + \gamma_1 D_1 + \gamma_2 D_2 + \gamma_3 D_3 + \gamma_4 D_4 + \\
& \gamma_5 D_5 + \gamma_6 D_6 + \gamma_7 D_7 + \gamma_8 D_8 + \gamma_9 D_9 + \gamma_{10} D_{10} + \gamma_{11} D_{11} + \gamma_{12} D_{12} + \gamma_{13} D_{13} \\
& + \gamma_{14} D_{14} + \gamma_{15} D_{15} + \gamma_{16} D_{16} + \gamma_{17} D_{17} + \gamma_{18} D_{18} + \gamma_{19} D_{19} + \gamma_{20} D_{20} + \\
& \gamma_{21} D_{21} + \gamma_{22} D_{22} + \gamma_{23} D_{23} + \gamma_{24} D_{24} + \gamma_{25} D_{25} + \gamma_{26} D_{26} + \gamma_{27} D_{27} + \gamma_{28} D_{28} \\
& + \gamma_{29} D_{29} + \gamma_{30} D_{30} + \gamma_{31} D_{31} + \gamma_{32} D_{32} + \gamma_{33} D_{33} + \gamma_{34} D_{34} + \mu_{it} \dots \quad (3.6)
\end{aligned}$$

dimana :

- $K$  = tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah  
 $Y$  = pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah  
 $U$  = upah minimum kabupaten/kota di Jawa Tengah  
 $PD$  = pendidikan kabupaten/kota di Jawa Tengah  
 $P$  = tingkat pengangguran kabupaten/kota di Jawa Tengah  
 $D_1$  = dummy Kabupaten Cilacap  
 $D_2$  = dummy Kabupaten Banyumas  
 $D_3$  = dummy Kabupaten Purbalingga  
 $D_4$  = dummy Kabupaten Banjarnegara  
 $D_5$  = dummy Kabupaten Kebumen  
 $D_6$  = dummy Kabupaten Purworejo  
 $D_7$  = dummy Kabupaten Wonosobo  
 $D_8$  = dummy Kabupaten Magelang  
 $D_9$  = dummy Kabupaten Boyolali  
 $D_{10}$  = dummy Kabupaten Klaten  
 $D_{11}$  = dummy Kabupaten Sukoharjo  
 $D_{12}$  = dummy Kabupaten Wonogiri

$D_{13}$	= dummy Kabupaten Karanganyar
$D_{14}$	= dummy Kabupaten Sragen
$D_{15}$	= dummy Kabupaten Grobogan
$D_{16}$	= dummy Kabupaten Blora
$D_{17}$	= dummy Kabupaten Rembang
$D_{18}$	= dummy Kabupaten Pati
$D_{19}$	= dummy Kabupaten Kudus
$D_{20}$	= dummy Kabupaten Jepara
$D_{21}$	= dummy Kabupaten Demak
$D_{22}$	= dummy Kabupaten Semarang
$D_{23}$	= dummy Kabupaten Temanggung
$D_{24}$	= dummy Kabupaten Kendal
$D_{25}$	= dummy Kabupaten Batang
$D_{26}$	= dummy Kabupaten Pekalongan
$D_{27}$	= dummy Kabupaten Pemasang
$D_{28}$	= dummy Kabupaten Tegal
$D_{29}$	= dummy Kabupaten Brebes
$D_{30}$	= dummy Kota Magelang
$D_{31}$	= dummy Kota Surakarta
$D_{32}$	= dummy Kota Salatiga
$D_{33}$	= dummy Kota Pekalongan
$D_{34}$	= dummy Kota Tegal
$\alpha_0$	= intersep

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  = koefisien regresi variabel bebas

$\gamma_1 - \gamma_{34}$  = koefisien dummy wilayah

$\mu_{it}$  = komponen error di waktu t untuk unit cross section i

i = 1, 2, 3, ..., 35 (data cross-section kabupaten/kota di Jawa Tengah)

t = 1, 2, 3, 4 (data time-series, tahun 2003-2007)

Model persamaan 3.6 tersebut akan diregres masing-masing dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square (OLS)*.

### 3.4 Pengujian Penyimpangan Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis data maka data diuji sesuai asumsi klasik, jika terjadi penyimpangan akan asumsi klasik digunakan pengujian statistik non parametrik sebaliknya asumsi klasik terpenuhi apabila digunakan statistik parametrik untuk mendapatkan model regresi yang baik, model regresi tersebut harus terbebas dari multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas serta data yang dihasilkan harus berdistribusi normal. Cara yang digunakan untuk menguji penyimpangan asumsi klasik adalah sebagai berikut :

#### a. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Apabila nilai  $R^2$  yang dihasilkan dalam suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan

mempengaruhi variabel dependen, hal ini merupakan salah satu indikasi terjadinya multikolinearitas (Imam Ghazali, 2005)

Multikolinearitas dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan *auxiliary regressions* untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. Kriterianya adalah jika  $R^2$  regresi persamaan utama lebih besar dari  $R^2$  regresi *auxiliary* maka di dalam model tidak terdapat multikolinearitas.

### **b. Uji Autokorelasi**

Menurut Imam Ghazali (2005), uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya), dimana jika terjadi korelasi dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (*time series*).

Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan uji *Breusch-Godfrey* (BG Test). Pengujian ini dilakukan dengan meregresi variabel pengganggu  $u_t$  dengan menggunakan model *autoregressive* dengan orde  $p$  sebagai berikut :

$$U_t = \rho_1 U_{t-1} + \rho_2 U_{t-2} + \dots + \rho_p U_{t-p} + \epsilon_t \dots \dots \dots (3.7)$$

Dengan  $H_0$  adalah  $\rho_1 = \rho_2 = \dots = \rho_p = 0$ , dimana koefisien *autoregressive* secara keseluruhan sama dengan nol, menunjukkan tidak terdapat autokorelasi

pada setiap orde. Secara manual, apabila  $\chi^2$  tabel lebih kecil dibandingkan dengan Obs\*R-squared, maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model dapat ditolak.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Gejala heteroskedastisitas lebih sering terjadi pada data *cross section* (Imam Ghazali, 2005).

Untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat digunakan Uji White. Secara manual, uji ini dilakukan dengan meregresi residual kuadrat ( $u_t^2$ ) dengan variabel bebas. Dapatkan nilai  $R^2$ , untuk menghitung  $\chi^2$ , dimana  $\chi^2 = n \cdot R^2$ . Kriteria yang digunakan adalah apabila  $\chi^2$  tabel lebih kecil dibandingkan dengan nilai Obs\*R-squared, maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam model dapat ditolak.

### d. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak berlaku (Imam Ghazali, 2005).

Ada beberapa metode untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi residual antara lain Jarque-Bera (J-B) *Test* dan metode grafik. Dalam penelitian ini akan menggunakan metode J-B *Test*, apabila J-B hitung < nilai  $\chi^2$  (Chi-Square) tabel, maka nilai residual terdistribusi normal.

### 3.5 Pengujian Statistik

#### a. Determinasi (Uji $R^2$ )

Suatu model mempunyai kebaikan dan kelemahan jika diterapkan dalam masalah yang berbeda. Untuk mengukur kebaikan suatu model (*goodnes of fit*) digunakan koefisien determinasi ( $R^2$ ). Koefisien deteminasi ( $R^2$ ) merupakan angka yang memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel tak bebas (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (X) (Gujarati, 2003). Koefisien determinasi dirumuskan sebagai berikut :

$$R^2 = \frac{\Sigma(\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{\Sigma(Y_i - \bar{Y})^2} \dots\dots\dots (3.8)$$

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Imam Ghozali, 2005)

### b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Pengujian terhadap pengaruh semua variabel independen di dalam model dapat dilakukan dengan uji simultan (uji F). Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat dalam model secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Algifari, 2000)

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama, menggunakan uji F dengan membuat hipotesis sebagai berikut :

$H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \gamma_1 = \dots = \gamma_{34} = 0$ , yaitu tidak ada pengaruh signifikansi variabel Y, U, PD, P dan dummy wilayah (34 kabupaten/kota di Jawa Tengah) secara bersama-sama terhadap variabel K.

$H_1 : \alpha_1 \neq \alpha_2 \neq \alpha_3 \neq \gamma_1 \neq \dots \neq \gamma_{34} \neq 0$ , yaitu terdapat pengaruh signifikansi variabel Y, U, PD, P dan dummy wilayah (34 kabupaten/kota di Jawa Tengah) secara bersama-sama terhadap variabel K.

Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan antara nilai F hitung dengan F tabel, dimana nilai F hitung dapat dipenuhi dengan formula sebagai berikut :

$$F \text{ hitung} = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)} \dots\dots\dots (3.9)$$

dimana :

$R^2$  : koefisien determinasi

k : jumlah variabel independen termasuk konstanta

n : jumlah sampel

Apabila nilai  $F$  hitung  $> F$  tabel maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_1$ . Artinya ada pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, dan sebaliknya bila,  $F$  hitung  $< F$  tabel maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. (Imam Ghozali, 2005).

**c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)**

Uji statistik  $t$  dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Imam Ghozali, 2005). Untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap dependen secara individu dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

(1)  $H_0 : \alpha_1 \leq 0$ , yaitu tidak ada pengaruh signifikansi variabel  $Y$  secara individu terhadap variabel  $K$ .

$H_1 : \alpha_1 > 0$ , yaitu terdapat pengaruh negatif signifikansi variabel  $Y$  secara individu terhadap variabel  $K$ .

(2)  $H_0 : \alpha_2 \leq 0$ , yaitu tidak ada pengaruh signifikansi variabel  $U$  secara individu terhadap variabel  $K$ .

$H_1 : \alpha_2 > 0$ , yaitu terdapat pengaruh negatif signifikansi variabel  $U$  secara individu terhadap variabel  $K$ .

(3)  $H_0 : \alpha_3 \leq 0$ , yaitu tidak ada pengaruh signifikansi variabel  $PD$  secara individu terhadap variabel  $K$ .

$H_1 : \alpha_3 > 0$ , yaitu terdapat pengaruh negatif signifikansi variabel  $PD$  secara individu terhadap variabel  $K$ .

(4)  $H_0 : \alpha_4 \leq 0$ , yaitu tidak ada pengaruh signifikansi variabel P secara individu terhadap variabel K.

$H_1 : \alpha_4 > 0$ , yaitu terdapat pengaruh positif signifikansi variabel P secara individu terhadap variabel K.

(5)  $H_0 : \gamma_1, \dots, \gamma_{34} \leq 0$ , yaitu tidak ada pengaruh signifikansi variabel dummy wilayah (34 kabupaten/kota di Jawa Tengah) secara individu terhadap variabel K.

$H_1 : \gamma_1, \dots, \gamma_{34} > 0$ , yaitu terdapat pengaruh positif signifikansi variabel dummy wilayah (34 kabupaten/kota di Jawa Tengah) secara individu terhadap variabel K.

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan statistik t, dimana nilai t hitung dapat diperoleh dengan formula sebagai berikut :

$$t \text{ hitung} = \frac{b_j}{se(b_j)} \dots\dots\dots (3.10)$$

dimana :

$b_j$  = koefisien regresi

$se(b_j)$  = *standar error* koefisien regresi

Uji t ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Apabila t hitung > t tabel, maka hipotesis alternatif diterima yang menyatakan bahwa variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya apabila t hitung < t tabel maka variabel independen secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Keadaan Geografis**

Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi di Pulau Jawa letaknya diapit oleh dua provinsi besar yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Secara geografis letaknya antara 5<sup>0</sup>40' dan 8<sup>0</sup>30' Lintang Selatan dan antara 108<sup>0</sup>30' dan 110<sup>0</sup>30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 263 km dan dari utara ke selatan adalah 226 km (tidak termasuk Pulau Karimunjawa).

Luas wilayah Jawa Tengah tercatat sebesar 3.254.412 hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa dan 1,70 persen dari luas Indonesia. Luas wilayah tersebut terdiri dari 991 ribu hektar (30,45 persen) lahan sawah dan 2,26 juta hektar (69,55 persen) bukan lahan sawah.

Provinsi Jawa Tengah dengan pusat pemerintahan di Kota Semarang, secara administratif terbagi dalam 35 kabupaten/kota (29 kabupaten dan 6 kota) dengan 565 kecamatan yang meliputi 7872 desa dan 622 kelurahan. Secara administratif Provinsi Jawa Tengah berbatasan oleh :

Sebelah Utara	: Laut Jawa
Sebelah Timur	: Jawa Timur
Sebelah Selatan	: Samudera Hindia
Sebelah Barat	: Jawa Barat

#### 4.1.2 Kemiskinan

Dalam arti *proper*, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas. Chambers (dalam Chriswardani Suryawati, 2005) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *intergrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.

Masalah kemiskinan bagi provinsi Jawa Tengah merupakan isu strategis dan mendapatkan prioritas utama untuk ditangani. Hal ini terbukti dalam Rencana Strategis (Renstra) Jawa Tengah (Perda No. 11/2003), dan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Tengah tahun 2005-2025. Upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan melalui berbagai strategi.. Secara langsung diwujudkan dalam bentuk pemberian dana bantuan stimulan sebagai modal usaha kegiatan ekonomi produktif dan bantuan sosial. Bantuan secara tidak langsung dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

**Tabel 4.1**  
**Alokasi APBD Jawa Tengah Untuk Penanggulangan Kemiskinan**  
**Tahun 2003-2007**

No	Tahun	Jumlah Anggaran
1	2003	Rp. 4.500.600.725
2	2004	Rp. 10.035.000.000
3	2005	Rp. 4.874.000.000
4	2006	Rp.132.729.379.000
5	2007	Rp. 327.531.369.407

Sumber: BPS, Bappeda Jawa Tengah 2009, Diolah.

Upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah Jawa Tengah dilakukan dengan dana yang bersumber dari APBD. Besarnya dana APBD yang dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan dapat dilihat pada tabel 4.1. Anggaran tersebut ada yang dilaksanakan melalui SKPD maupun diberikan langsung kepada kabupaten/kota melalui dana bantuan langsung. Pada tahun 2007 anggaran penanggulangan kemiskinan sebesar 327.531.369.407 rupiah, jumlah ini merupakan anggaran terbesar dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Anggaran ini naik sebesar 71,78 persen dibanding tahun 2003, peningkatan anggaran ini diharapkan mampu menurunkan tingkat kemiskinan

Tabel 4.2 menunjukkan kondisi tingkat kemiskinan di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Pada tahun 2003 hingga 2005 tingkat kemiskinan di semua kabupaten/kota mengalami penurunan. Pada tahun 2006 tingkat kemiskinan di semua kabupaten/kota mengalami kenaikan, hal ini terjadi karena pengaruh tingginya inflasi sebagai pengaruh dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di tahun 2005. Di tahun 2007 tingkat kemiskinan kembali turun kecuali di kabupaten Batang dan kota Salatiga.

Rata-rata tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di kabupaten Wonosobo dengan rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 32,90 persen, kemudian diikuti kabupaten Rembang sebesar 31,74 persen dan kabupaten Purbalingga sebesar 31,01 persen. Ada empat kota yang memiliki rata-rata tingkat kemiskinan relatif rendah atau di bawah *hard core* (10 persen), yaitu kota Semarang (5,60 persen), kota Pekalongan (6,96 persen), kota Tegal (9,55 persen) dan kota Salatiga (9,60 persen).

**Tabel 4.2**  
**Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2003-2007 (persen)**

No	Kabupaten /kota	Tingkat Kemiskinan					Rata-rata
		2003	2004	2005	2006	2007	
1	Kab. Cilacap	20,9	20,9	22,25	24,93	22,59	22,31
2	Kab. Banyumas	21,5	21,47	22,02	24,44	22,46	22,38
3	Kab. Purbalingga	31,27	31,2	29,95	32,38	30,24	31,01
4	Kab. Banjarnegara	26,88	26,91	27,35	29,4	27,18	27,54
5	Kab. Kebumen	31	30,95	29,83	32,49	30,25	30,90
6	Kab. Purworejo	24,79	23,51	22,77	22,75	20,49	22,86
7	Kab. Wonosobo	32,96	33,15	31,68	34,43	32,29	32,90
8	Kab. Magelang	17,45	16,1	15,42	17,36	17,37	16,74
9	Kab. Boyolali	18,48	18,47	17,75	20	18,06	18,55
10	Kab. Klaten	23,84	23,38	22,48	22,99	22,27	22,99
11	Kab. Sukoharjo	15,17	14,38	13,67	15,63	14,02	14,57
12	Kab. Wonogiri	24,09	24,43	25,21	27,01	24,44	25,04
13	Kab. Karanganyar	17,45	16,14	16,14	18,69	17,39	17,16
14	Kab. Sragen	27,01	26,06	24,28	23,72	21,24	24,46
15	Kab. Grobogan	29,19	29,3	28	27,6	25,14	27,85
16	Kab. Blora	23,38	22,97	21,73	23,95	21,46	22,70
17	Kab. Rembang	32,06	32	30,72	33,2	30,71	31,74
18	Kab. Pati	20,66	20,67	19,82	22,14	19,79	20,62
19	Kab. Kudus	12,34	11,47	10,93	12,05	10,73	11,50
20	Kab. Jepara	10,11	9,88	10,39	11,75	10,44	10,51
21	Kab. Demak	24,43	24,97	23,6	26,03	23,5	24,51
22	Kab. Semarang	14,04	13,68	13,16	13,62	12,34	13,37
23	Kab. Temanggung	15,69	15,22	14,5	16,62	16,55	15,72
24	Kab. Kendal	22,84	20,87	20,06	21,59	20,7	21,21
25	Kab. Batang	20,68	19,01	18,15	19,99	20,79	19,72
26	Kab. Pekalongan	23,66	21,5	20,47	22,8	20,31	21,75
27	Kab. Pemasang	24,02	22,31	22,59	25,3	22,79	23,40
28	Kab. Tegal	21,42	20,53	19,6	20,71	18,5	20,15
29	Kab. Brebes	31,18	29,1	27,79	30,36	27,93	29,27
30	Kota Magelang	14,8	14,01	12,94	11,19	10,01	12,59
31	Kota Surakarta	15	13,72	13,34	15,21	13,64	14,18
32	Kota Salatiga	11,59	9,68	8,81	8,9	9,01	9,60
33	Kota Semarang	6,61	5,6	5,22	5,33	5,26	5,60
34	Kota Pekalongan	7,64	6,81	6,37	7,38	6,62	6,96
35	Kota Tegal	9,53	9,49	8,96	10,4	9,36	9,55

Sumber: BPS, Jawa Tengah Dalam Angka, 2009.

### 4.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya yang ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Simon Kuznetz dalam Todaro, 2004). Menurut Robinson Tarigan (2004) pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*value added*) yang terjadi di wilayah tersebut.

Dari Tabel 4.3 menunjukkan bahwa perkembangan perekonomian di Jawa Tengah selama tahun 2003-2007 cenderung ke arah yang lebih baik, hal ini ditunjukkan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang diukur berdasarkan kenaikan PDRB non migas atas dasar harga konstan 2000 di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah, yang mana menunjukkan angka yang positif. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian dari tahun ke tahun. Kota Surakarta memiliki rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Jawa Tengah, sebesar 5,66 persen, kemudian diikuti kabupaten Karanganyar (5,59 persen), dan kota Tegal (5,38 persen).. Sedangkan kabupaten yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi paling rendah adalah kabupaten Batang (2,69 persen) dan kabupaten wonosobo (2,92 persen).

**Tabel 4.3**  
**Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2007 (persen)**

<b>Kabupaten/kota</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>Rata-rata</b>
Kab. Cilacap	4,54	4,93	5,33	4,72	4,87	4,88
Kab. Banyumas	3,71	4,17	3,21	3,48	5,30	3,97
Kab. Purbalingga	3,14	3,35	4,18	5,06	6,19	4,38
Kab. Banjarnegara	2,96	3,81	3,95	4,35	5,01	4,02
Kab. Kebumen	2,93	1,18	3,20	4,08	4,52	3,18
Kab. Purworejo	3,64	4,17	4,85	5,23	6,08	4,80
Kab. Wonosobo	2,28	2,34	3,19	3,23	3,58	2,92
Kab. Magelang	4,01	4,03	4,62	4,91	5,21	4,56
Kab. Boyolali	4,86	3,42	4,08	4,19	4,08	4,12
Kab. Klaten	4,94	4,86	4,59	2,30	3,31	4,00
Kab. Sukoharjo	3,97	4,33	4,11	4,53	5,11	4,41
Kab. Wonogiri	2,53	4,10	4,31	4,07	5,07	4,02
Kab. Karanganyar	5,63	5,98	5,49	5,08	5,74	5,59
Kab. Sragen	2,63	4,93	5,16	5,18	5,73	4,73
Kab. Grobogan	2,20	3,78	4,74	4,00	4,37	3,82
Kab. Blora	3,28	3,75	4,07	3,85	3,95	3,78
Kab. Rembang	3,01	4,53	3,56	5,53	3,81	4,09
Kab. Pati	-2,12	4,25	3,94	4,45	5,19	3,14
Kab. Kudus	5,56	8,70	4,40	2,48	3,23	4,87
Kab. Jepara	3,76	4,00	4,23	4,19	4,74	4,18
Kab. Demak	2,83	3,40	3,86	4,02	4,15	3,65
Kab. Semarang	3,75	1,46	3,11	3,81	4,72	3,37
Kab. Temanggung	3,37	3,92	3,99	3,31	4,03	3,72
Kab. Kendal	2,85	2,61	2,63	3,66	4,28	3,21
Kab. Batang	2,55	2,07	2,80	2,51	3,49	2,69
Kab. Pekalongan	3,26	4,39	3,98	4,21	4,59	4,09
Kab. Pemasang	3,35	3,84	4,05	3,72	4,47	3,89
Kab. Tegal	4,54	5,29	4,72	5,19	5,51	5,05
Kab. Brebes	4,86	4,83	4,80	4,71	4,79	4,80
Kota Magelang	3,74	3,71	4,33	2,44	5,17	3,88
Kota Surakarta	6,11	5,80	5,15	5,43	5,82	5,66
Kota Salatiga	3,25	4,24	4,15	4,17	5,39	4,24
Kota Semarang	4,04	4,12	5,14	5,71	5,98	5,00
Kota Pekalongan	3,86	4,07	4,82	3,06	3,80	3,92
Kota Tegal	5,82	5,85	4,87	5,15	5,21	5,38

Sumber : BPS, Berbagai Sumber Terbitan dan Tahun Terbitan, Diolah.

#### **4.1.4 Upah Minimum**

Kebijakan upah minimum di Indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 dan UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Yang dimaksud dengan tunjangan tetap adalah suatu jumlah imbalan yang diterima pekerja secara tetap dan teratur pembayarannya, yang tidak dikaitkan dengan kehadiran ataupun pencapaian prestasi tertentu.

Dalam rangka mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja, perlu ditetapkan upah minimum dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya. Upah minimum merupakan upah terendah yang diterima karyawan/pekerja yang masa kerjanya dibawah satu tahun. Bagi yang bekerja lebih dari satu tahun, maka upah yang diterima diatur oleh peraturan perusahaan dengan sistem pengupahan yang telah disepakati antara pengusaha dan serikat pekerja perusahaan. Penetapan upah minimum kabupaten/kota harus tetap berdasarkan kesepakatan tripartit antara buruh, pengusaha, dan pemerintah. Fungsi upah minimum pada dasarnya sebagai jaring pengaman terhadap pekerja atau buruh agar tidak dieksploitasi dalam bekerja sehingga penentuannya tetap melibatkan pemerintah.

**Tabel 4.4**  
**Upah Minimum Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2007**  
**(rupiah)**

<b>No</b>	<b>Kabupaten /kota</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
1	Kab. Cilacap	385.500	403.333	433.333	458.166	601.000
2	Kab. Banyumas	372.600	380.000	420.000	493.500	520.000
3	Kab. Purbalingga	345.000	380.000	420.000	499.500	525.000
4	Kab. Banjarnegara	342.500	380.175	417.000	490.500	510.000
5	Kab. Kebumen	348.800	365.000	410.000	465.000	507.000
6	Kab. Purworejo	350.000	390.000	410.000	460.000	500.000
7	Kab. Wonosobo	360.000	388.000	420.000	458.000	508.000
8	Kab. Magelang	362.000	387.500	423.500	500.000	540.000
9	Kab. Boyolali	357.500	385.000	413.000	490.000	570.000
10	Kab. Klaten	358.500	394.500	410.000	480.250	540.250
11	Kab. Sukoharjo	370.500	396.000	417.000	490.000	550.000
12	Kab. Wonogiri	354.000	380.000	406.000	450.000	500.000
13	Kab. Karanganyar	375.000	400.000	420.000	500.000	580.000
14	Kab. Sragen	357.500	382.500	406.000	485.000	550.000
15	Kab. Grobogan	340.400	365.000	391.000	450.000	502.000
16	Kab. Blora	346.900	366.000	390.100	450.000	600.000
17	Kab. Rembang	350.200	365.000	390.000	471.800	521.000
18	Kab. Pati	379.000	402.500	425.000	488.000	550.000
19	Kab. Kudus	384.000	417.000	450.000	515.000	650.000
20	Kab. Jepara	376.000	413.600	440.000	525.000	535.000
21	Kab. Demak	378.500	410.000	442.000	500.000	581.000
22	Kab. Semarang	386.500	430.000	463.600	515.000	595.000
23	Kab. Temanggung	345.500	375.000	412.000	455.000	505.000
24	Kab. Kendal	377.500	410.000	444.500	560.000	615.000
25	Kab. Batang	362.000	400.000	430.000	500.000	555.000
26	Kab. Pekalongan	375.000	400.000	430.000	500.000	565.000
27	Kab. Pemasang	380.000	400.000	417.000	530.000	540.000
28	Kab. Tegal	365.000	400.000	420.000	475.000	520.000
29	Kab. Brebes	360.000	390.000	417.000	500.400	515.000
30	Kota Magelang	361.600	385.000	410.000	485.000	520.000
31	Kota Surakarta	378.000	407.000	427.000	510.000	590.000
32	Kota Salatiga	380.500	408.500	430.000	500.000	582.000
33	Kota Semarang	400.000	440.000	473.600	586.000	650.000
34	Kota Pekalongan	375.000	400.000	430.000	500.000	555.000
35	Kota Tegal	364.000	400.000	440.000	475.000	520.000

Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka, 2008.

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa pada tahun 2003 hingga tahun 2007, upah minimum kabupaten/kota di Jawa Tengah terus mengalami kenaikan, dengan adanya peningkatan upah minimum kabupaten/kota di Jawa Tengah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan mendorong produktivitas pekerja. Dalam kurun waktu empat tahun antara tahun 2003 hingga 2006 kota Semarang selalu memiliki upah minimum tertinggi dibanding daerah lain. Hal ini disebabkan karena kota Semarang merupakan ibu kota provinsi Jawa Tengah, dimana biaya hidup lebih tinggi, sehingga upah minimum juga lebih tinggi. Pada tahun 2007 tingkat upah minimum tertinggi dimiliki oleh kota Semarang dan kabupaten Kudus sebesar 650.000 rupiah. Kabupaten Kudus mengalami kenaikan upah minimum 26,21 persen dibanding kota Semarang yang hanya naik 10,92 persen. Sedangkan upah minimum terendah dimiliki oleh kabupaten Wonogiri dan Purworejo sebesar 500.000 rupiah.

#### **4.1.5 Pendidikan**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sepiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

**Tabel 4.5**  
**Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas yang Lulus SMA Keatas Menurut**  
**Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2007 (jiwa)**

No	Kabupaten /kota	2003	2004	2005	2006	2007
1	Kab. Cilacap	105.019	162.843	163.181	166.930	183.160
2	Kab. Banyumas	233.296	228.110	201.631	220.435	268.518
3	Kab. Purbalingga	75.940	68.754	123.644	70.815	92.002
4	Kab. Banjarnegara	83.609	66.158	116.946	59.579	74.675
5	Kab. Kebumen	116.322	114.758	123.644	138.390	114.789
6	Kab. Purworejo	61.880	100.898	116.946	118.824	110.235
7	Kab. Wonosobo	47.057	44.588	51.261	51.398	61.988
8	Kab. Magelang	135.375	140.438	152.189	180.260	172.313
9	Kab. Boyolali	126.439	132.874	137.923	147.830	144.199
10	Kab. Klaten	229.564	260.317	249.716	276.345	252.771
11	Kab. Sukoharjo	140.658	194.039	203.267	216.307	190.872
12	Kab. Wonogiri	75.622	92.974	94.607	98.068	97.222
13	Kab. Karanganyar	131.924	127.944	147.232	131.875	138.389
14	Kab. Sragen	101.848	95.776	101.760	135.960	135.725
15	Kab. Grobogan	95.194	103.202	78.655	125.207	111.593
16	Kab. Blora	68.695	66.407	85.093	85.881	99.189
17	Kab. Rembang	35.417	37.480	59.540	46.065	65.736
18	Kab. Pati	130.289	143.485	177.487	176.549	167.143
19	Kab. Kudus	104.922	98.504	120.341	151.789	144.125
20	Kab. Jepara	117.691	130.992	124.746	130.948	143.529
21	Kab. Demak	76.314	103.378	117.748	126.390	126.276
22	Kab. Semarang	107.953	117.876	149.876	151.517	149.562
23	Kab. Temanggung	54.684	66.075	74.958	76.650	74.416
24	Kab. Kendal	76.937	106.737	115.415	130.860	124.992
25	Kab. Batang	51.103	44.481	59.638	39.600	62.434
26	Kab. Pekalongan	64.231	64.032	63.384	93.048	75.684
27	Kab. Pemalang	112.786	94.828	92.760	123.333	118.834
28	Kab. Tegal	113.204	136.360	124.648	111.636	130.180
29	Kab. Brebes	87.898	97.548	136.357	129.326	145.021
30	Kota Magelang	39.847	42.522	47.966	51.088	67.220
31	Kota Surakarta	187.139	190.399	203.904	191.844	190.376
32	Kota Salatiga	53.388	54.063	62.422	54.450	61.215
33	Kota Semarang	460.870	483.618	525.680	561.923	551.538
34	Kota Pekalongan	57.874	59.226	61.992	63.346	68.490
35	Kota Tegal	44.046	20.601	48.312	50.932	56.826
<b>Total</b>		<b>3.805.035</b>	<b>4.092.285</b>	<b>4.514.869</b>	<b>4.685.398</b>	<b>4.771.237</b>

Sumber : BPS, Indikator Ekonomi Jawa Tengah, 2008.

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerja seseorang (Rasidin K, 2004), maka indikator pendidikan yang dilihat dalam penelitian ini adalah penduduk usia produktif (10 tahun keatas) yang telah lulus pendidikan SMA keatas (lulus pendidikan menengah dan tinggi) termasuk didalamnya pendidikan SMA sederajat, D1, D2, D3, S1, S2, dan S3. Dimana pada tingkat pendidikan ini tingkat keahlian dan tingkat produktivitas lebih tinggi dibandingkan lulusan tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP), sehingga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperbaiki kesejahteraannya karena pendapatan yang diperoleh lebih tinggi dibanding lulusan pendidikan dasar.

Pada tahun 2003 hingga tahun 2007, jumlah penduduk berumur sepuluh tahun keatas yang lulus pendidikan SMA keatas di Jawa Tengah terus meningkat dari sebesar 3.805.035 jiwa di tahun 2003 menjadi sebesar 4.771.237 jiwa di tahun 2007, seperti yang ditunjukkan tabel 4.5. Jumlah lulusan SMA keatas di setiap kabupaten/kota bervariasi, tergantung dari jumlah penduduk dan variasi umur penduduk daerah masing-masing. Kota Semarang tiap tahunnya menjadi penyumbang jumlah lulusan SMA keatas terbesar di Jawa Tengah, kemudian didikuti kabupaten Banyumas, kabupaten Klaten dan kota Surakarta, sedangkan tiga kota yang memiliki jumlah terendah dalam menghasilkan lulusan SMA keatas tiap tahunnya adalah kota Magelang, kabupaten Batang dan kabupaten Rembang.

#### 4.1.6 Pengangguran

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran terbuka adalah penduduk yang telah masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran di Jawa Tengah tergolong masih tinggi, dimana masih dalam kisaran diatas 5 persen. Tingkat pengangguran di Jawa Tengah tidak stabil, mengalami beberapa kali fase naik turun. Pada tahun 2003, tingkat pengangguran sebesar 5,66 persen, kemudian naik menjadi 6,54 persen di tahun 2004. Peningkatan tingkat pengangguran terjadi secara beruntun dari tahun 2006 dan tahun 2007, dari 5,88 di tahun 2005 menjadi 7,29 di tahun 2006 dan 7,7 di tahun 2007.

Dari Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2003 hingga 2007. Tingkat pengangguran kabupaten/kota di Jawa Tengah di tahun 2007 meningkat dibanding tahun 2003, kondisi ini menunjukkan usaha pemerintah dalam menurunkan tingkat pengangguran masih belum berhasil. Daerah yang tercatat memiliki rata-rata tingkat pengangguran terbesar adalah Kota Salatiga (11,90 persen), kota Pekalongan (11,01 persen) dan kota Tegal (10,73 persen). Untuk daerah yang memiliki rata-rata tingkat kemiskinan terendah adalah kabupaten Wonosobo (3,35 persen), kabupaten Blora (3,36 persen), dan kabupaten Purworejo (3,69 persen).

**Tabel 4.6**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2007 (persen)**

<b>No</b>	<b>Kabupaten /kota</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>Rata-rata</b>
1	Kab. Cilacap	8,36	9,79	10,42	10,27	11,48	10,06
2	Kab. Banyumas	5,26	5	5,01	8,36	8,07	6,34
3	Kab. Purbalingga	3,66	4,56	3,84	4,45	7,56	4,81
4	Kab. Banjarnegara	4,52	6,69	6,43	6,82	6,39	6,17
5	Kab. Kebumen	4,86	5,78	5,9	9,61	7,18	6,67
6	Kab. Purworejo	1,74	3,04	4,03	4,19	5,43	3,69
7	Kab. Wonosobo	1,76	3,28	2,92	3,11	5,68	3,35
8	Kab. Magelang	5,49	6,08	6,07	6,15	6,26	6,01
9	Kab. Boyolali	3,96	6,25	5,07	4,27	7,25	5,36
10	Kab. Klaten	5,48	7,68	4,39	8,14	8,2	6,78
11	Kab. Sukoharjo	7,05	9,08	7,65	8,01	9,45	8,25
12	Kab. Wonogiri	4,11	5,04	6,28	7,07	5,2	5,54
13	Kab. Karanganyar	4,56	5,26	5,31	5,79	4,79	5,14
14	Kab. Sragen	4,45	4,27	4,28	4,31	4,21	4,30
15	Kab. Grobogan	5,46	5,46	3,53	5,3	5,83	5,12
16	Kab. Blora	2,4	3,65	2,88	3,94	3,92	3,36
17	Kab. Rembang	2,84	5,05	5,75	7,59	5,7	5,39
18	Kab. Pati	4,99	4,76	4,16	8,38	8,38	6,13
19	Kab. Kudus	4,49	7,28	5,25	5,14	7,03	5,84
20	Kab. Jepara	4,34	4,3	4,39	4,10	5,78	4,58
21	Kab. Demak	6,22	9,21	6,3	6,66	7,04	7,09
22	Kab. Semarang	4,9	4,55	4,79	5,61	9,36	5,84
23	Kab. Temanggung	3,48	3,78	3,56	4,46	6,77	4,41
24	Kab. Kendal	5,32	4,61	4,63	8,22	5,42	5,64
25	Kab. Batang	7,9	9,14	6,93	9,33	8,13	8,29
26	Kab. Pekalongan	6,17	5,63	5,95	6,31	6,93	6,20
27	Kab. Pemalang	7,81	7,57	6,7	11,44	8,53	8,41
28	Kab. Tegal	9,15	7,67	7,5	9,14	9,38	8,57
29	Kab. Brebes	8,35	6,89	5,87	11,53	9,01	8,33
30	Kota Magelang	12,89	9,09	13,24	9,16	8,37	10,55
31	Kota Surakarta	8,06	8,09	7,27	9,32	9,31	8,41
32	Kota Salatiga	10,17	13,29	11,49	13,2	11,35	11,90
33	Kota Semarang	7,92	12,2	9,38	9,8	11,39	10,14
34	Kota Pekalongan	10,63	11,8	12,4	10,57	9,64	11,01
35	Kota Tegal	10,75	9,29	10,26	8,6	14,75	10,73

Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka, Berbagai Tahun Terbitan.

## 4.2 Hasil Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

### 4.2.1 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan keadaan dimana terdapat hubungan linear atau terdapat korelasi antar variabel independen. Dalam penelitian ini untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas dilihat dari perbandingan antara nilai  $R^2$  regresi parsial (*auxiliary regression*) dengan nilai  $R^2$  regresi utama. Apabila nilai  $R^2$  regresi parsial (*auxiliary regression*) lebih besar dibandingkan nilai  $R^2$  regresi utama, maka dapat disimpulkan bahwa dalam persamaan tersebut terjadi multikolinearitas. Tabel 4.7 menunjukkan perbandingan antara nilai  $R^2$  regresi parsial (*auxiliary regression*) dengan nilai  $R^2$  regresi utama. Tabel 4.7 menunjukkan bahwa model persamaan tidak mengandung multikolinearitas karena tidak ada nilai  $R^2$  regresi parsial (*auxiliary regression*) yang lebih besar dibandingkan nilai  $R^2$  regresi utama.

**Tabel 4.7**  
 **$R^2$  Hasil *Auxiliary Regression* Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pendidikan, dan Pengangguran, Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2003-2007**

Regresi	$R^{2*}$	$R^2$
$Y = f(U, PD, P)$	0,480308	0,982677
$U = f(Y, PD, P)$	0,509344	0,982677
$PD = f(Y, U, P)$	0,97575	0,982677
$P = f(Y, U, PD)$	0,817529	0,982677

Sumber : Lampiran C

$R^2$  =  $R^2$  hasil regresi utama

$R^{2*}$  =  $R^2$  hasil *auxiliary regression*

#### 4.2.2 Uji Autokorelasi

Menurut Imam Ghozali (2005), uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah di dalam model regresi terjadi hubungan korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ( $t-1$ ). Dalam penelitian ini digunakan uji Breusch-Godfrey untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi yang dapat dilihat pada Tabel 4.8

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji *Breusch-Godfrey* (BG)**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test	
F-statistic	3,080867
Obs*R-squared	6,705505

Sumber : Lampiran C

Pada model persamaan pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2003-2007 dengan  $n = 175$  dan  $k = 39$ , maka diperoleh *degree of freedom* ( $df$ ) =  $136$  ( $n-k$ ), dan menggunakan  $\alpha = 5$  persen diperoleh nilai  $\chi^2$  tabel sebesar 124,342. Dibandingkan dengan nilai Obs\*R-squared uji Breusch-Godfrey regresi sebesar 3,080867, maka nilai Obs\*R-squared uji Breusch-Godfrey lebih kecil dibandingkan nilai  $\chi^2$  tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi persamaan tersebut bebas dari gejala autokorelasi.

#### 4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas muncul apabila kesalahan atau residual dari model yang diamati tidak memiliki varians yang konstan dari satu observasi ke observasi lainnya. Artinya, setiap observasi mempunyai reliabilitas yang berbeda akibat

perubahan dalam kondisi yang melatarbelakangi tidak terangkum dalam spesifikasi model (Imam Ghozali, 2005).

Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi fenomena heteroskedastisitas digunakan Uji White. Hasil Uji White dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut:

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji White)**

Heteroskedasticity Test: White	
F-statistic	0,898550
Obs*R-squared	35,11924

Sumber: Lampiran C

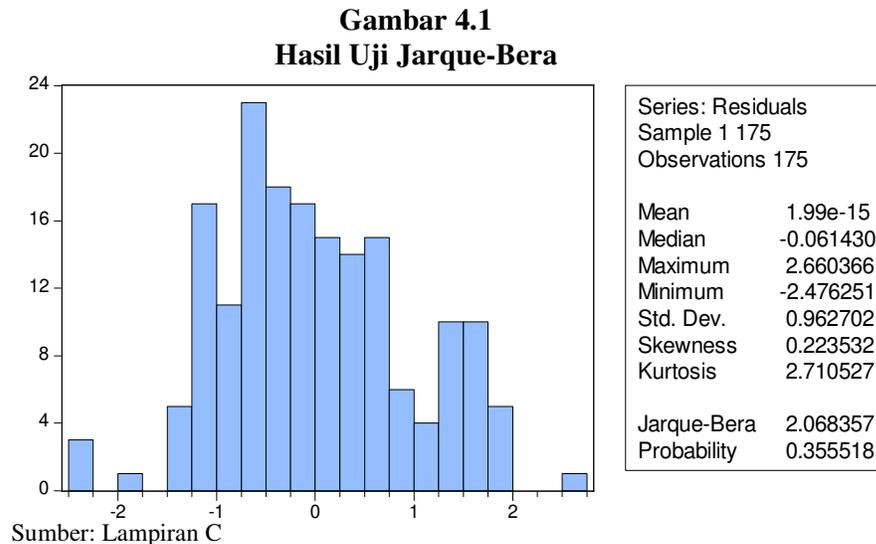
Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan membandingkan nilai Obs\*R-squared Uji White dengan nilai  $\chi^2$  tabel. Nilai Obs\*R-squared yang lebih besar dibandingkan nilai  $\chi^2$  tabel, menunjukkan bahwa model estimasi regresi terbebas dari fenomena heteroskedastisitas. Pada model ini, dengan  $n=175$  dan  $k=39$ , maka diperoleh *degree of freedom* (df) = 136. Dengan  $\alpha = 5\%$ , diperoleh nilai  $\chi^2$  tabel sebesar 124,342, dibandingkan dengan Obs\*R-squared dari hasil regresi Uji White, maka nilai Obs\*R-squared Uji White lebih kecil dibandingkan nilai  $\chi^2$  tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi persamaan tersebut tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

#### 4.2.4 Uji Normalitas

Salah satu asumsi dalam model regresi linier adalah distribusi probabilitas gangguan  $\mu_i$  memiliki rata-rata yang diharapkan sama dengan nol, tidak berkorelasi, dan mempunyai varians yang konstan. Uji Normalitas bertujuan

untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak (Imam Ghozali, 2005).

Untuk menguji apakah data terdistribusi normal atau tidak, dilakukan Uji Jarque-Bera. Hasil Uji J-B *Test* dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut,



Pada model ini, dengan  $n=175$  dan  $k=39$ , maka diperoleh *degree of freedom* ( $df$ ) = 136. Dengan  $\alpha = 10\%$ , diperoleh nilai  $\chi^2$  tabel sebesar 124,342. Dibandingkan dengan nilai Jarque Bera pada Gambar 4.1 sebesar 2,068357, dapat ditarik kesimpulan bahwa probabilitas gangguan  $\mu_1$  regresi tersebut terdistribusi secara normal karena nilai Jarque Bera lebih kecil dibanding nilai  $\chi^2$  tabel.

### 4.3 Hasil Uji Statistik Analisis Regresi

#### 4.3.1 Koefisien Determinasi (Uji $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Dari hasil regresi pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2003-2007 pada lampiran B diperoleh nilai  $R^2$  sebesar 0,982677. Hal ini berarti sebesar 98,27 persen variasi tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh 38 variabel independen yaitu variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, pengangguran dan dummy wilayah (34 kabupaten/kota di Jawa Tengah). Sedangkan sisanya sebesar 1,73 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

#### **4.3.2 Pengujian Signifikansi Simultan (Uji F)**

Pengujian terhadap pengaruh semua variabel independen di dalam model dapat dilakukan dengan uji F. Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Hasil regresi pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2003-2007 dengan menggunakan taraf keyakinan 95 persen ( $\alpha = 5$  persen), *degree of freedom for numerator* (dfn) = 38 ( $k-1 = 39-1$ ) dan *degree of freedom for denominator* (dfd) = 136 ( $n-k = 175-39$ ), diperoleh F-tabel sebesar 1,55. Dari hasil regresi

diperoleh F-statistik sebesar 203,1177, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (F-statistik > F-tabel).

### 4.3.3 Pengujian Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2003-2007 dengan menggunakan taraf keyakinan 95 persen ( $\alpha = 5$  persen), persen dan *degree of freedom* (df) = 136 (n-k = 175-39), maka diperoleh nilai t-tabel sebesar 1,960 dan dengan  $\alpha = 10$  persen diperoleh nilai t-tabel sebesar 1,645.

Dari Tabel 4.10, dapat disimpulkan bahwa pada taraf keyakinan 95 persen ( $\alpha = 5$  persen), variabel P (tingkat pengangguran) berpengaruh signifikan secara statistik terhadap variabel tingkat kemiskinan, sedangkan pada taraf keyakinan 90 persen ( $\alpha = 10$  persen), variabel yang berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan adalah variabel Y (pertumbuhan ekonomi), variabel (U) upah minimum dan variabel PD (Pendidikan). Untuk variabel *dummy*, pada taraf keyakinan 95 persen ( $\alpha = 5$  persen) ada 27 variabel *dummy* yang signifikan, dan pada taraf keyakinan 90 persen ( $\alpha = 10$  persen) ada 1 variabel *dummy* yg signifikan, serta ada 6 variabel *dummy* yg tidak signifikan.

**Tabel 4.10**  
**Nilai t-statistik dan Koefisien Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pendidikan, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan**  
**Di Jawa Tengah Tahun 2003-2007**

Variabel	t-statistik	koefisien
Pertumbuhan Ekonomi (Y)	-1,717212**	-0,173200**
Upah minimum (U)	-1,693359**	-0,00000276**
Pendidikan (PD)	-1,764703**	-0,0000109**
Pengangguran (P)	3,351337*	0,248067*
<i>Dummy</i> Kab. Cilacap (D <sub>1</sub> )	5,498106*	12,61675*
<i>Dummy</i> Kab. Banyumas (D <sub>2</sub> )	7,663515*	14,20653*
<i>Dummy</i> Kab. Purbalingga (D <sub>3</sub> )	7,663515*	21,70082*
<i>Dummy</i> Kab. Banjarnegara (D <sub>4</sub> )	6,510905*	17,75463*
<i>Dummy</i> Kab. Kebumen (D <sub>5</sub> )	8,611874*	21,70082*
<i>Dummy</i> Kab. Purworejo (D <sub>6</sub> )	5,366405*	14,04264*
<i>Dummy</i> Kab. Wonosobo (D <sub>7</sub> )	7,989520*	23,30332*
<i>Dummy</i> Kab. Magelang (D <sub>8</sub> )	3,469722*	7,954450*
<i>Dummy</i> Kab. Boyolali (D <sub>9</sub> )	4,016986*	9,654001*
<i>Dummy</i> Kab. Klaten (D <sub>10</sub> )	8,713467*	14,97108*
<i>Dummy</i> Kab. Sukoharjo (D <sub>11</sub> )	2,665798*	5,573603*
<i>Dummy</i> Kab. Wonogiri (D <sub>12</sub> )	5,841615*	15,50052*
<i>Dummy</i> Kab. Karanganyar (D <sub>13</sub> )	3,517908*	8,578067*
<i>Dummy</i> Kab. Sragen (D <sub>14</sub> )	6,14384*	15,65304*
<i>Dummy</i> Kab. Grobogan (D <sub>15</sub> )	7,154181*	18,47973*
<i>Dummy</i> Kab. Blora (D <sub>16</sub> )	4,948375*	13,58239*
<i>Dummy</i> Kab. Rembang (D <sub>17</sub> )	7,483671*	21,78951*
<i>Dummy</i> Kab. Pati (D <sub>18</sub> )	5,093900*	11,60338*
<i>Dummy</i> Kab. Kudus (D <sub>19</sub> )	1,022497	2,576172
<i>Dummy</i> Kab. Jepara (D <sub>20</sub> )	0,716223	1,770321
<i>Dummy</i> Kab. Demak (D <sub>21</sub> )	5,769010*	14,84652*
<i>Dummy</i> Kab. Semarang (D <sub>22</sub> )	1,755344**	4,289492**
<i>Dummy</i> Kab. Temanggung (D <sub>23</sub> )	2,207669*	6,167973*
<i>Dummy</i> Kab. Kendal (D <sub>24</sub> )	4,590009*	11,89781*
<i>Dummy</i> Kab. Batang (D <sub>25</sub> )	3,065196*	8,924541*
<i>Dummy</i> Kab. Pekalongan (D <sub>26</sub> )	4,270494*	11,94617*
<i>Dummy</i> Kab. Pemalang (D <sub>27</sub> )	5,214664*	13,41337*
<i>Dummy</i> Kab. Tegal (D <sub>28</sub> )	4,218610*	10,43908*
<i>Dummy</i> Kab. Brebes (D <sub>29</sub> )	7,820865*	19,53214*
<i>Dummy</i> Kota Magelang (D <sub>30</sub> )	0,470190	1,368645
<i>Dummy</i> Kota Surakarta (D <sub>31</sub> )	2,606256*	5,447159*
<i>Dummy</i> Kota Salatiga (D <sub>32</sub> )	-0,600485	-1,738421
<i>Dummy</i> Kota Pekalongan (D <sub>33</sub> )	-1,462493	-4,172956
<i>Dummy</i> Kota Tegal (D <sub>34</sub> )	-0,506833	-1,498142

Sumber : Lampiran B

\* = Signifikan pada  $\alpha = 10$  persen, t-tabel=1, 645

\*\* = Signifikan pada  $\alpha = 5$  persen, t-tabel=1, 960

#### 4.4 Interpretasi Hasil dan Pembahasan

Pada regresi pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2003-2007, dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS), diperoleh nilai koefisien regresi untuk setiap variabel dalam penelitian, yang ditunjukkan dalam Tabel 4.10.

Interpretasi dari hasil regresi pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2003-2007 adalah sebagai berikut :

1). Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Dari hasil regresi, diperoleh hasil bahwa koefisien dari pertumbuhan ekonomi (Y) sebesar -0,173200 dan signifikan secara statistik artinya yaitu bahwa adanya kenaikan 1 persen pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,173200 persen. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin. Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja yaitu sektor pertanian atau sektor yang padat kerja. Adapun secara tidak langsung, diperlukan pemerintah yang cukup efektif mendistribusikan manfaat pertumbuhan yang mungkin didapatkan dari sektor modern seperti jasa yang padat modal. Dari hasil penelitian berarti

pertumbuhan ekonomi telah menyebar di setiap golongan masyarakat termasuk masyarakat miskin sehingga efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan, ini sesuai dengan penelitian Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008). Hal ini juga sesuai dengan penelitian Wongdesmiwati (2009) yang menggunakan PDB sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi. Karena hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan, maka hipotesis penelitian dapat diterima.

## 2). Upah Minimum (U)

Dari hasil regresi ditemukan bahwa upah minimum memberikan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan koefisien sebesar - 0,00000276. Hal ini berarti kenaikan upah minimum sebesar 10.000 rupiah akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,00000276 persen. Semakin tinggi upah minimum akan memicu penurunan tingkat kemiskinan. Hasil ini sesuai dengan tujuan penetapan upah minimum yang disampaikan Kaufman (2000) dan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 dan UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga terbebas dari kemiskinan. Penetapan upah minimum yang mendekati KHM (Kebutuhan Hidup Minimum) dan diatas garis kemiskinan telah tepat karena mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap

tingkat kemiskinan sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan, maka hipotesis penelitian dapat diterima.

### 3). Pendidikan

Dari hasil regresi diketahui bahwa pendidikan yang diukur menggunakan jumlah lulusan SMA keatas kabupaten/kota di Jawa Tengah memberikan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah dengan koefisien sebesar - 0,0000109. Kenaikan pendidikan sebesar 1000 jiwa akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,0000109 persen. Hal ini juga sesuai dengan teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan memperkerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan juga akan bersedia memberikan gaji yang lebih tinggi bagi yang bersangkutan. Di sektor informal seperti pertanian, peningkatan ketrampilan dan keahlian tenaga kerja akan mampu meningkatkan hasil pertanian, karena tenaga kerja yang terampil mampu bekerja lebih efisien. Pada akhirnya seseorang yang

memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya (Rasidin K dan Bonar M, 2004).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008), dimana menggunakan jumlah lulusan SMP, jumlah lulusan SMA dan jumlah lulusan diploma sebagai ukuran pendidikan. Hal ini juga sesuai dengan penelitian Wongdesmiwati (2009), yang menggunakan angka melek huruf sebagai ukuran pendidikan serta penelitian Rasidin K. Sitepu dan Bonar M. Sinaga (2005) yang menunjukkan investasi pendidikan mampu menurunkan kemiskinan. Karena hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan, maka hipotesis penelitian dapat diterima.

#### 4). Tingkat Pengangguran

Dari hasil regresi ditemukan bahwa tingkat pengangguran memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Kenaikan tingkat pengangguran sebesar 1 persen akan menyebabkan peningkatan ketimpangan wilayah sebesar 0,248067 persen. Semakin tinggi tingkat pengangguran akan memicu peningkatan tingkat kemiskinan Hasil ini sesuai dengan pendapat Sadono Sukirno (2004), yang menyatakan bahwa dampak buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat, dan ini mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai. Ditinjau dari sudut individu, pengangguran menimbulkan berbagai masalah

ekonomi dan sosial kepada yang mengalaminya. Keadaan pendapatan menyebabkan para penganggur harus mengurangi pengeluarannya. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan, maka hipotesis penelitian dapat diterima.

##### 5). *Dummy*

Dalam menginterpretasikan hasil regresi data panel dengan menggunakan metode *LSDV* yang menggunakan variabel *dummy*. Signifikannya variabel *dummy* yang digunakan menunjukkan bahwa kondisi tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Jawa Tengah tersebut tidak sama (berbeda) dengan perkembangan tingkat kemiskinan Kota Semarang yang dijadikan sebagai *benchmark*. Kota Semarang dijadikan *benchmark* karena tingkat kemiskinannya paling rendah dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Sementara angka positif atau negatif pada koefisien *dummy* menunjukkan bahwa kabupaten/kota yang dinyatakan dengan variabel *dummy* tersebut memiliki kondisi tingkat kemiskinan yang lebih rendah (untuk tanda negatif) atau lebih

tinggi (untuk tanda positif) dibandingkan Kota Semarang yang dijadikan *benchmark*.

Dari hasil Persamaan 4.2 diketahui bahwa selama lima tahun periode penelitian terdapat 28 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang memiliki kondisi kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Kota Semarang, yaitu Kab. Cilacap Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara, Kab. Kebumen, Kab. Purworejo, Kab. Wonosobo, Kab. Magelang, Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kab. Wonogiri, Kab. Karanganyar, Kab. Sragen, Kab. Grobogan, Kab. Blora, Kab. Rembang, Kab. Pati, Kab. Demak, Kab. Semarang, Kab. Temanggung, Kab. Kendal, Kab. Batang, Kab. Pekalongan, Kab. Pemasang, Kab. Tegal, Kab. Brebes, dan Kota Surakarta. Perbedaan kondisi ini terjadi karena tiap daerah memiliki kondisi geografis dan ekonomi yang berbeda-beda, termasuk perbedaan kondisi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinannya, seperti perbedaan pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan tingkat pengangguran. Sedangkan kabupaten/kota di Jawa Tengah yang memiliki kondisi tingkat kemiskinan sama rendahnya dengan Kota Semarang adalah Kab. Kudus, Kab. Jepara, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal. Rendahnya tingkat kemiskinan di Kota Semarang, Kab. Kudus, dan Kab. Jepara disebabkan oleh tingginya pertumbuhan ekonomi di daerah itu, sedangkan kesamaan kondisi tingkat kemiskinan di lima kota karena adanya kesamaan karakter kota yaitu adanya dominasi industri dalam kegiatan perekonomiannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasar analisis yang telah dilakukan pada Bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Model regresi pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2003-2007 cukup layak digunakan karena telah memenuhi dan melewati uji asumsi klasik, yaitu uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji normalitas.
2. Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2003-2007 menunjukkan bahwa besarnya nilai  $R^2$  cukup tinggi yaitu 0,982677. Nilai ini berarti model yang dibentuk cukup baik dimana 98,27 persen variasi variabel dependen tingkat kemiskinan dapat dijelaskan dengan baik oleh variabel-variabel independen yakni pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, tingkat pengangguran, *dummy benchmark* yakni Kota Semarang, dan *dummy* wilayah-wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan 1.73 persen sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor di luar model. Diperlukan penelitian yang lebih lanjut untuk menganalisis variabel-variabel lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan.

3. Uji F-statistik menunjukkan bahwa semua variabel independen dalam model regresi pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2003-2007 yakni pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan dan tingkat pengangguran, serta *dummy* wilayah secara bersama-sama mempengaruhi variabel tingkat kemiskinan.
4. Dari hasil regresi pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2003-2007 dapat disimpulkan bahwa pada taraf keyakinan 95 persen ( $\alpha = 5$  persen), variabel tingkat pengangguran dan 27 *dummy* wilayah kabupaten/kota secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan pada taraf keyakinan 90 persen ( $\alpha = 10$  persen), variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan serta 1 *dummy* wilayah yaitu kabupaten Semarang secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.
5. Hasil regresi terhadap variabel *dummy* wilayah, dimana Kota Semarang yang menjadi *benchmark* atau yang tidak di *dummy* (nol) menunjukkan bahwa 28 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang memiliki perkembangan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dan ada 6 kabupaten memiliki perkembangan tingkat kemiskinan yang sama dengan perkembangan tingkat kemiskinan Kota Semarang, yaitu Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal.

6. Dari penelitian, dapat diketahui bahwa yang berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan adalah variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan tingkat pengangguran.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diberikan, maka dapat diberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian, didapat bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, sehingga hendaknya ke depan dapat dilaksanakan pembangun yang berorientasi pada pemerataan pendapatan serta pemerataan hasil-hasil ekonomi keseluruhan golongan masyarakat, serta dilakukan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah dengan mengandalkan potensi-potensi yang dimiliki.
2. Upah minimum yang ditetapkan pemerintah juga berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Untuk itu kebijakan penetapan upah minimum harus tetap dilakukan dan tingkat upahnya dinaikkan sesuai KHL (Kebutuhan Hidup Layak) untuk melindungi pekerja dari kemiskinan.
3. Pendidikan memiliki pengaruh yang negatif terhadap tingkat kemiskinan. Kebijakan wajib belajar 9 tahun hendaknya ditingkatkan menjadi 12 tahun, sehingga semua mendapat pendidikan yang lebih tinggi dari pada pendidikan dasar, sehingga tingkat kemiskinan dapat diturunkan. Memberikan jaminan pendidikan bagi orang miskin serta meningkatkan

fasilitas-fasilitas pendidikan secara merata tidak hanya terpusat di suatu daerah tetapi merata ke seluruh daerah.

4. Tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Untuk menurunkan tingkat kemiskinan, maka tingkat pengangguran juga harus diturunkan, dengan mempermudah izin pendirian usaha agar kesempatan kerja semakin besar, sehingga banyak tenaga kerja yang terserap.

## DAFTAR PUSTAKA

- Algifari, 2000, **Analisis Regresi : Teori, Kasus, dan Solusi. Edisi 2**, BPFE, Yogyakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Tengah. 2007. **Dukungan Provinsi Jawa Tengah Dalam Pemberantasan Kemiskinan.** [http://p3b.bappenas.go.id/Loknas\\_Wonosobo/Content/docs/materi/2-Bappeda%20Jateng.pdf](http://p3b.bappenas.go.id/Loknas_Wonosobo/Content/docs/materi/2-Bappeda%20Jateng.pdf) . Diakses tanggal 24 Maret 2010.
- Badan Pusat Statistik. 2009. **Berita Resmi Statistik Jawa Tengah.** Jawa Tengah
- \_\_\_\_\_. 2007. **Data Dan Informasi Kemiskinan Jawa Tengah.** Jawa Tengah
- \_\_\_\_\_. **Jawa Tengah Dalam Angka Berbagai Tahun Terbitan.** Jawa Tengah .
- \_\_\_\_\_. **PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Berbagai Tahun Terbitan.** Jawa Tengah.
- \_\_\_\_\_. **Statistik Indonesia Berbagai Tahun Terbitan.** Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2008. **Tinjauan PDRB Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah 2007.** Jawa Tengah.
- Baltagi, Badi H, 2005, **Econometric Analysis of Panel Data. Third Edition,** John Wiley & Sons, Ltd, England.
- Boediono, 2002, **Ekonomi Mikro : Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.1, Edisi 2**, BPFE, Yogyakarta.
- Criswardani Suryawati, 2005. **Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional.** [http://www.jmpk-online.net/Volume 8/Vol 08 No 03 2005.pdf](http://www.jmpk-online.net/Volume%208/Vol%2008%20No%2003%202005.pdf). Diakses tanggal 11 November 2009.
- Dian Satria, 2008. **Modal Manusia Dan Globalisasi: Peran Subsidi Pendidikan.** <http://www.diassatria.web.id/wp-content/uploads/2008/12/jurnal-indef-subsidi.pdf> . Diakses tanggal 11 November 2009.

- Gujarati, Damodar, 2003, **Basic Econometrics, Fourth Edition**. McGraw-Hill Companies, New York.
- Hasanuddin Rachman, 2005, **Pengaruh Pengupahan Sebagai langkah Strategis Stabilitas Dalam Hubungan Industrial**. Jakarta.
- Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, 2008, **Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin**.  
[http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/PROS\\_2008\\_MAK3.pdf](http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/PROS_2008_MAK3.pdf). Diakses tanggal 29 Oktober 2009.
- Hsiao, C, 2003, **Analysis of Panel Data**, Cambridge University Press, New York.
- Imam Ghozali, 2005. **Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS**. BP Undip: Semarang.
- Kaufman, Bruce, 2000, **The Economics of Labor Markets, Fifth Edition**, The Dryden Press, New York.
- Mudrajad Kuncoro, 2003. **Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan**. UPP AMP YKPN: Yogyakarta.
- Mankiw, Gregory, 2006, **Pengantar Ekonomi Mikro, Edisi Ketiga**, Penerjemah : Chriswan Sungkono, Salemba Empat, Jakarta.
- Marzuki, 2005, **Metodologi Riset**. Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta.
- M. Muh. Nasir, Saichudin dan Maulizar. 2008. **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Kabupaten Purworejo**. *Jurnal Eksekutif*. Vol. 5 No. 4, Agustus 2008. Lipi. Jakarta.
- Rasidin K. Sitepu dan Bonar M. Sinaga, 2004. **Dampak Investasi Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia: Pendekatan Model Computable General Equilibrium**.  
<http://ejournal.unud.ac.id/?module=detailpenelitian&idf=7&idj=48&idv=181&idi=48&idr=191>. Diakses tanggal 29 Oktober 2009.
- Robinson Tarigan, 2004. **Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi**. Bumi Aksara: Jakarta.
- Sadono Sukirno, 1999, **Makroekonomi Modern**. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2004, **Makroekonomi Teori Pengantar, Edisi Ketiga**. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Sonny Sumarsono, 2003, **Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan**. Penerbit Graha Ilmu, Jember.
- Sri Aditya N. P, 2010. **Analisis Ketimpangan antar Wilayah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya dengan Model Panel Data (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2000-2007)**. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Todaro, Michael P. 2003. **Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga**. Penerjemah: Haris Munandar. Erlangga: Jakarta.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2004. **Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi kedelapan**. Erlangga: Jakarta.
- Wongdesmiwati, 2009. **Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia: Analisis Ekonometrika**.  
[http://wongdesmiwati.files.wordpress.com/2009/10/pertumbuhan-ekonomi-dan-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-analisis-ekonometri .pdf](http://wongdesmiwati.files.wordpress.com/2009/10/pertumbuhan-ekonomi-dan-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-analisis-ekonometri.pdf). Diakses tanggal 7 Desember 2009.



## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**LAMPIRAN A**  
**DATA KEMISKINAN,**  
**PERTUMBUHAN**  
**EKONOMI, UPAH**  
**MINIMUM, PENDIDIKAN,**  
**DAN PENGANGGURAN DI**  
**JAWA TENGAH TAHUN**  
**2003-2007**

**Data Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pendidikan, dan Pengangguran  
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2003-2007**

<b>No</b>	<b>Kabupaten /kota</b>	<b>Tahun</b>	<b>K</b>	<b>Y</b>	<b>U</b>	<b>PD</b>	<b>P</b>
1	Kota Semarang	2003	6,61	4,04	400.000	460.870	7,92
2	Kota Semarang	2004	5,6	4,12	440.000	483.618	12,20
3	Kota Semarang	2005	5,22	5,14	473.600	525.680	9,38
4	Kota Semarang	2006	5,33	5,71	586.000	561.923	9,80
5	Kota Semarang	2007	5,26	5,98	650.000	551.538	11,39
6	Kabupaten Cilacap	2003	20,9	4,54	385.500	105.019	8,36
7	Kabupaten Cilacap	2004	20,9	4,93	403.333	162.843	9,79
8	Kabupaten Cilacap	2005	22,25	5,33	433.333	163.181	10,42
9	Kabupaten Cilacap	2006	24,93	4,72	458.166	166.930	10,27
10	Kabupaten Cilacap	2007	22,59	4,87	601.000	183.160	11,48
11	Kabupaten Banyumas	2003	21,5	3,71	372.600	233.296	5,26
12	Kabupaten Banyumas	2004	21,47	4,17	380.000	228.110	5,00
13	Kabupaten Banyumas	2005	22,02	3,21	420.000	201.631	5,01
14	Kabupaten Banyumas	2006	24,44	3,48	493.500	220.435	8,36
15	Kabupaten Banyumas	2007	22,46	5,30	520.000	268.518	8,07
16	Kabupaten Purbalingga	2003	31,27	3,14	345.000	75.940	3,66
17	Kabupaten Purbalingga	2004	31,2	3,35	380.000	68.754	4,56
18	Kabupaten Purbalingga	2005	29,95	4,18	420.000	123.644	3,84
19	Kabupaten Purbalingga	2006	32,38	5,06	499.500	70.815	4,45
20	Kabupaten Purbalingga	2007	30,24	6,19	525.000	92.002	7,56
21	Kabupaten Banjarnegara	2003	26,88	2,96	342.500	83.609	4,52

22	Kabupaten Banjarnegara	2004	26,91	3,81	380.175	66.158	6,69
23	Kabupaten Banjarnegara	2005	27,35	3,95	417.000	116.946	6,43
24	Kabupaten Banjarnegara	2006	29,4	4,35	490.500	59.579	6,82
25	Kabupaten Banjarnegara	2007	27,18	5,01	510.000	74.675	6,39
26	Kabupaten Kebumen	2003	31	2,93	348.800	116.322	4,86
27	Kabupaten Kebumen	2004	30,95	1,18	365.000	114.758	5,78
28	Kabupaten Kebumen	2005	29,83	3,20	410.000	123.644	5,90
29	Kabupaten Kebumen	2006	32,49	4,08	465.000	138.390	9,61
30	Kabupaten Kebumen	2007	30,25	4,52	507.000	114.789	7,18
31	Kabupaten Purworejo	2003	24,79	3,64	350.000	61.880	1,74
32	Kabupaten Purworejo	2004	23,51	4,17	390.000	100.898	3,04
33	Kabupaten Purworejo	2005	22,77	4,85	410.000	116.946	4,03
34	Kabupaten Purworejo	2006	22,75	5,23	460.000	118.824	4,19
35	Kabupaten Purworejo	2007	20,49	6,08	500.000	110.235	5,43
36	Kabupaten. Wonosobo	2003	32,96	2,28	360.000	47.057	1,76
37	Kabupaten. Wonosobo	2004	33,15	2,34	388.000	44.588	3,28
38	Kabupaten. Wonosobo	2005	31,68	3,19	420.000	51.261	2,92
39	Kabupaten. Wonosobo	2006	34,43	3,23	458.000	51.398	3,11
40	Kabupaten. Wonosobo	2007	32,29	3,58	508.000	61.988	5,68
41	Kabupaten Magelang	2003	17,45	4,01	362.000	135.375	5,49
42	Kabupaten Magelang	2004	16,1	4,03	387.500	140.438	6,08
43	Kabupaten Magelang	2005	15,42	4,62	423.500	152.189	6,07
44	Kabupaten Magelang	2006	17,36	4,91	500.000	180.260	6,15
45	Kabupaten Magelang	2007	17,37	5,21	540.000	172.313	6,26

46	Kabupaten Boyolali	2003	18,48	4,86	357.500	126.439	3,96
47	Kabupaten Boyolali	2004	18,47	3,42	385.000	132.874	6,25
48	Kabupaten Boyolali	2005	17,75	4,08	413.000	137.923	5,07
49	Kabupaten Boyolali	2006	20	4,19	490.000	147.830	4,27
50	Kabupaten Boyolali	2007	18,06	4,08	570.000	144.199	7,25
51	Kabupaten Klaten	2003	23,84	4,94	358.500	229.564	5,48
52	Kabupaten Klaten	2004	23,38	4,86	394.500	260.317	7,68
53	Kabupaten Klaten	2005	22,48	4,59	410.000	249.716	4,39
54	Kabupaten Klaten	2006	22,99	2,30	480.250	276.345	8,14
55	Kabupaten Klaten	2007	22,27	3,31	540.250	252.771	8,20
56	Kabupaten Sukoharjo	2003	15,17	3,97	370.500	140.658	7,05
57	Kabupaten Sukoharjo	2004	14,38	4,33	396.000	194.039	9,08
58	Kabupaten Sukoharjo	2005	13,67	4,11	417.000	203.267	7,65
59	Kabupaten Sukoharjo	2006	15,63	4,53	490.000	216.307	8,01
60	Kabupaten Sukoharjo	2007	14,02	5,11	550.000	190.872	9,45
61	Kabupaten Wonogiri	2003	24,09	2,53	354.000	75.622	4,11
62	Kabupaten Wonogiri	2004	24,43	4,10	380.000	92.974	5,04
63	Kabupaten Wonogiri	2005	25,21	4,31	406.000	94.607	6,28
64	Kabupaten Wonogiri	2006	27,01	4,07	450.000	98.068	7,07
65	Kabupaten Wonogiri	2007	24,44	5,07	500.000	97.222	5,20
66	Kabupaten Karanganyar	2003	17,45	5,63	375.000	131.924	4,56
67	Kabupaten Karanganyar	2004	16,14	5,98	400.000	127.944	5,26
68	Kabupaten Karanganyar	2005	16,14	5,49	420.000	147.232	5,31
69	Kabupaten Karanganyar	2006	18,69	5,08	500.000	131.875	5,79

70	Kabupaten Karanganyar	2007	17,39	5,74	580.000	138.389	4,79
71	Kabupaten Sragen	2003	27,01	2,63	357.500	101.848	4,45
72	Kabupaten Sragen	2004	26,06	4,93	382.500	95.776	4,27
73	Kabupaten Sragen	2005	24,28	5,16	406.000	101.760	4,28
74	Kabupaten Sragen	2006	23,72	5,18	485.000	135.960	4,31
75	Kabupaten Sragen	2007	21,24	5,73	550.000	135.725	4,21
76	Kabupaten Grobogan	2003	29,19	2,20	340.400	95.194	5,46
77	Kabupaten Grobogan	2004	29,3	3,78	365.000	103.202	5,46
78	Kabupaten Grobogan	2005	28	4,74	391.000	78.655	3,53
79	Kabupaten Grobogan	2006	27,6	4,00	450.000	125.207	5,30
80	Kabupaten Grobogan	2007	25,14	4,37	502.000	111.593	5,83
81	Kabupaten Blora	2003	23,38	3,28	346.900	68.695	2,40
82	Kabupaten Blora	2004	22,97	3,75	366.000	66.407	3,65
83	Kabupaten Blora	2005	21,73	4,07	390.100	85.093	2,88
84	Kabupaten Blora	2006	23,95	3,85	450.000	85.881	3,94
85	Kabupaten Blora	2007	21,46	3,95	600.000	99.189	3,92
86	Kabupaten Rembang	2003	32,06	3,01	350.200	35.417	2,84
87	Kabupaten Rembang	2004	32	4,53	365.000	37.480	5,05
88	Kabupaten Rembang	2005	30,72	3,56	390.000	59.540	5,75
89	Kabupaten Rembang	2006	33,2	5,53	471.800	46.065	7,59
90	Kabupaten Rembang	2007	30,71	3,81	521.000	65.736	5,70
91	Kabupaten Pati	2003	20,66	-2,12	379.000	130.289	4,99
92	Kabupaten Pati	2004	20,67	4,25	402.500	143.485	4,76
93	Kabupaten Pati	2005	19,82	3,94	425.000	177.487	4,16

94	Kabupaten Pati	2006	22,14	4,45	488.000	176.549	8,38
95	Kabupaten Pati	2007	19,79	5,19	550.000	167.143	8,38
96	Kabupaten Kudus	2003	12,34	5,56	384.000	104.922	4,49
97	Kabupaten Kudus	2004	11,47	8,70	417.000	98.504	7,28
98	Kabupaten Kudus	2005	10,93	4,40	450.000	120.341	5,25
99	Kabupaten Kudus	2006	12,05	2,48	515.000	151.789	5,14
100	Kabupaten Kudus	2007	10,73	3,23	650.000	144.125	7,03
101	Kabupaten Jepara	2003	10,11	3,76	376.000	117.691	4,34
102	Kabupaten Jepara	2004	9,88	4,00	413.600	130.992	4,30
103	Kabupaten Jepara	2005	10,39	4,23	440.000	124.746	4,39
104	Kabupaten Jepara	2006	11,75	4,19	525.000	130.948	4,10
105	Kabupaten Jepara	2007	10,44	4,74	535.000	143.529	5,78
106	Kabupaten Demak	2003	24,43	2,83	378.500	76.314	6,22
107	Kabupaten Demak	2004	24,97	3,40	410.000	103.378	9,21
108	Kabupaten Demak	2005	23,6	3,86	442.000	117.748	6,30
109	Kabupaten Demak	2006	26,03	4,02	500.000	126.390	6,66
110	Kabupaten Demak	2007	23,5	4,15	581.000	126.276	7,04
111	Kabupaten Semarang	2003	14,04	3,75	386.500	107.953	4,90
112	Kabupaten Semarang	2004	13,68	1,46	430.000	117.876	4,55
113	Kabupaten Semarang	2005	13,16	3,11	463.600	149.876	4,79
114	Kabupaten Semarang	2006	13,62	3,81	515.000	151.517	5,61
115	Kabupaten Semarang	2007	12,34	4,72	595.000	149.562	9,36
116	Kabupaten Temanggung	2003	15,69	3,37	345.500	54.684	3,48
117	Kabupaten Temanggung	2004	15,22	3,92	375.000	66.075	3,78

118	Kabupaten Temanggung	2005	14,5	3,99	412.000	74.958	3,56
119	Kabupaten Temanggung	2006	16,62	3,31	455.000	76.650	4,46
120	Kabupaten Temanggung	2007	16,55	4,03	505.000	74.416	6,77
121	Kabupaten Kendal	2003	22,84	2,85	377.500	76.937	5,32
122	Kabupaten Kendal	2004	20,87	2,61	410.000	106.737	4,61
123	Kabupaten Kendal	2005	20,06	2,63	444.500	115.415	4,63
124	Kabupaten Kendal	2006	21,59	3,66	560.000	130.860	8,22
125	Kabupaten Kendal	2007	20,7	4,28	615.000	124.992	5,42
126	Kabupaten Batang	2003	20,68	2,55	362.000	51.103	7,90
127	Kabupaten Batang	2004	19,01	2,07	400.000	44.481	9,14
128	Kabupaten Batang	2005	18,15	2,80	430.000	59.638	6,93
129	Kabupaten Batang	2006	19,99	2,51	500.000	39.600	9,33
130	Kabupaten Batang	2007	20,79	3,49	555.000	62.434	8,13
131	Kabupaten Pekalongan	2003	23,66	3,26	375.000	64.231	6,17
132	Kabupaten Pekalongan	2004	21,5	4,39	400.000	64.032	5,63
133	Kabupaten Pekalongan	2005	20,47	3,98	430.000	63.384	5,95
134	Kabupaten Pekalongan	2006	22,8	4,21	500.000	93.048	6,31
135	Kabupaten Pekalongan	2007	20,31	4,59	565.000	75.684	6,93
136	Kabupaten Pemasang	2003	24,02	3,35	380.000	112.786	7,81
137	Kabupaten Pemasang	2004	22,31	3,84	400.000	94.828	7,57
138	Kabupaten Pemasang	2005	22,59	4,05	417.000	92.760	6,70
139	Kabupaten Pemasang	2006	25,3	3,72	530.000	123.333	11,44
140	Kabupaten Pemasang	2007	22,79	4,47	540.000	118.834	8,53
141	Kabupaten Tegal	2003	21,42	4,54	365.000	113.204	9,15

142	Kabupaten Tegal	2004	20,53	5,29	400.000	136.360	7,67
143	Kabupaten Tegal	2005	19,6	4,72	420.000	124.648	7,50
144	Kabupaten Tegal	2006	20,71	5,19	475.000	111.636	9,14
145	Kabupaten Tegal	2007	18,5	5,51	520.000	130.180	9,38
146	Kabupaten Brebes	2003	31,18	4,86	360.000	87.898	8,35
147	Kabupaten Brebes	2004	29,1	4,83	390.000	97.548	6,89
148	Kabupaten Brebes	2005	27,79	4,80	417.000	136.357	5,87
149	Kabupaten Brebes	2006	30,36	4,71	500.400	129.326	11,53
150	Kabupaten Brebes	2007	27,93	4,79	515.000	145.021	9,01
151	Kota Magelang	2003	14,8	3,74	361.600	39.847	12,89
152	Kota Magelang	2004	14,01	3,71	385.000	42.522	9,09
153	Kota Magelang	2005	12,94	4,33	410.000	47.966	13,24
154	Kota Magelang	2006	11,19	2,44	485.000	51.088	9,16
155	Kota Magelang	2007	10,01	5,17	520.000	67.220	8,37
156	Kota Surakarta	2003	15	6,11	378.000	187.139	8,06
157	Kota Surakarta	2004	13,72	5,80	407.000	190.399	8,09
158	Kota Surakarta	2005	13,34	5,15	427.000	203.904	7,27
159	Kota Surakarta	2006	15,21	5,43	510.000	191.844	9,32
160	Kota Surakarta	2007	13,64	5,82	590.000	190.376	9,31
161	Kota Salatiga	2003	11,59	3,25	380.500	53.388	10,17
162	Kota Salatiga	2004	9,68	4,24	408.500	54.063	13,29
163	Kota Salatiga	2005	8,81	4,15	430.000	62.422	11,49
164	Kota Salatiga	2006	8,9	4,17	500.000	54.450	13,20
165	Kota Salatiga	2007	9,01	5,39	582.000	61.215	11,35

166	Kota Pekalongan	2003	7,64	3,86	375.000	57.874	10,63
167	Kota Pekalongan	2004	6,81	4,07	400.000	59.226	11,80
168	Kota Pekalongan	2005	6,37	4,82	430.000	61.992	12,40
169	Kota Pekalongan	2006	7,38	3,06	500.000	63.346	10,57
170	Kota Pekalongan	2007	6,62	3,80	555.000	68.490	9,64
171	Kota Tegal	2003	9,53	5,82	364.000	44.046	10,75
172	Kota Tegal	2004	9,49	5,85	400.000	20.601	9,29
173	Kota Tegal	2005	8,96	4,87	440.000	48.312	10,26
174	Kota Tegal	2006	10,4	5,15	475.000	50.932	8,60
175	Kota Tegal	2007	9,36	5,21	520.000	56.826	14,75

**LAMPIRAN B  
HASIL REGRESI UTAMA  
PENGARUH PERTUMBUHAN  
EKONOMI, UPAH MINIMUM,  
PENDIDIKAN, DAN  
PENGANGGURAN  
TERHADAP TINGKAT  
KEMISKINAN DI JAWA  
TENGAH TAHUN 2003-2007**

**HASIL REGRESI PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, UPAH  
MINIMUM, PENDIDIKAN, DAN PENGANGGURAN TERHADAP  
TINGKAT KEMISKINAN DI JAWA TENGAH TAHUN 2003-2007**

Dependent Variable: K				
Method: Least Squares				
Date: 06/26/10 Time: 14:47				
Sample: 1 175				
Included observations: 175				
	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Y	-0.173200	0.100861	-1.717212	0.0882
U	-2.76E-06	1.63E-06	-1.693359	0.0927
PD	-1.09E-05	6.20E-06	-1.764703	0.0799
P	0.248067	0.074020	3.351337	0.0010
D1	12.61675	2.294744	5.498106	0.0000
D2	14.20653	1.853787	7.663515	0.0000
D3	21.70082	2.705952	8.019662	0.0000
D4	17.75463	2.726906	6.510905	0.0000
D5	21.27487	2.470412	8.611874	0.0000
D6	14.04264	2.616769	5.366405	0.0000
D7	23.30332	2.916736	7.989520	0.0000
D8	7.954450	2.292532	3.469722	0.0007
D9	9.654001	2.403295	4.016986	0.0001
D10	14.97108	1.718155	8.713467	0.0000
D11	5.573603	2.090782	2.665798	0.0086
D12	15.50052	2.653465	5.841615	0.0000
D13	8.578067	2.438400	3.517908	0.0006
D14	15.65304	2.548780	6.141386	0.0000
D15	18.47973	2.583067	7.154181	0.0000
D16	13.58239	2.744819	4.948375	0.0000
D17	21.78951	2.911606	7.483671	0.0000
D18	11.60338	2.277898	5.093900	0.0000
D19	2.576172	2.519491	1.022497	0.3084
D20	1.770321	2.471745	0.716223	0.4751
D21	14.84652	2.573495	5.769010	0.0000
D22	4.289492	2.443676	1.755344	0.0815
D23	6.167973	2.793885	2.207669	0.0289
D24	11.89781	2.592110	4.590009	0.0000
D25	8.924541	2.911573	3.065196	0.0026
D26	11.94617	2.797375	4.270494	0.0000
D27	13.41337	2.572240	5.214664	0.0000
D28	10.43908	2.474530	4.218610	0.0000
D29	19.53214	2.497440	7.820865	0.0000
D30	1.368645	2.910835	0.470190	0.6390
D31	5.447159	2.090032	2.606256	0.0102
D32	-1.738421	2.895030	-0.600485	0.5492
D33	-4.172956	2.853316	-1.462493	0.1459
D34	-1.498142	2.955886	-0.506833	0.6131
C	11.01278	2.881436	3.821977	0.0002
R-squared	0.982677	Mean dependent var	20.05520	
Adjusted R-squared	0.977836	S.D. dependent var	7.314355	
S.E. of regression	1.088923	Akaike info criterion	3.201839	
Sum squared resid	161.2625	Schwarz criterion	3.907134	
Log likelihood	-241.1609	Hannan-Quinn criter.	3.487927	
F-statistic	203.0177	Durbin-Watson stat	2.204019	
Prob(F-statistic)	0.000000			

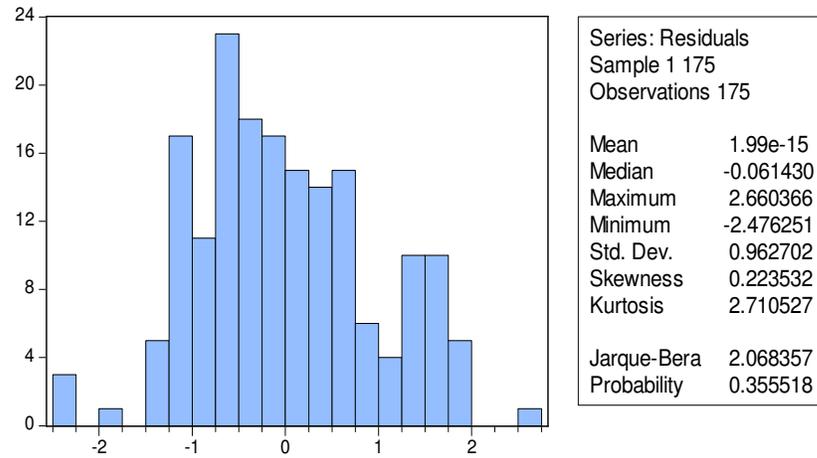
**LAMPIRAN C**  
**UJI ASUMSI KLASIK**  
**PENGARUH PERTUMBUHAN**  
**EKONOMI, UPAH MINIMUM,**  
**PENDIDIKAN, DAN**  
**PENGANGGURAN**  
**TERHADAP TINGKAT**  
**KEMISKINAN DI JAWA**  
**TENGAH TAHUN 2003-2007**

### HASIL UJI AUTOKORELASI (B-G Test)

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:				
F-statistic	3.374395	Prob. F(2,134)	0.0372	
Obs*R-squared	8.391107	Prob. Chi-Square(2)	0.0151	
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID				
Method: Least Squares				
Date: 07/22/10 Time: 14:06				
Sample: 1 175				
Included observations: 175				
Presample missing value lagged residuals set to zero.				
	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Y	-0.002294	0.100167	-0.022898	0.9818
U	-5.87E-07	1.72E-06	-0.341503	0.7333
PD	-9.67E-07	6.16E-06	-0.157074	0.8754
P	-0.006082	0.073680	-0.082553	0.9343
D1	-0.448606	2.274893	-0.197199	0.8440
D2	-0.235462	1.830404	-0.128639	0.8978
D3	-0.347650	2.673187	-0.130051	0.8967
D4	-0.506150	2.699168	-0.187521	0.8515
D5	-0.370436	2.441306	-0.151737	0.8796
D6	-0.247104	2.583007	-0.095665	0.9239
D7	-0.682267	2.886863	-0.236335	0.8135
D8	-0.471206	2.271190	-0.207471	0.8360
D9	-0.303868	2.372593	-0.128074	0.8983
D10	-0.139158	1.695930	-0.082054	0.9347
D11	-0.438781	2.070120	-0.211959	0.8325
D12	-0.482213	2.624585	-0.183729	0.8545
D13	-0.417513	2.414041	-0.172952	0.8630
D14	-0.105259	2.515340	-0.041847	0.9667
D15	-0.462937	2.553227	-0.181314	0.8564
D16	-0.643455	2.717452	-0.236786	0.8132
D17	-0.487937	2.879948	-0.169426	0.8657
D18	-0.372027	2.251087	-0.165265	0.8690
D19	-0.333695	2.493805	-0.133810	0.8938
D20	-0.486386	2.445411	-0.198898	0.8426
D21	-0.375381	2.545421	-0.147473	0.8830
D22	-0.248193	2.415115	-0.102766	0.9183
D23	-0.621232	2.766374	-0.224565	0.8227
D24	-0.329995	2.562799	-0.128764	0.8977
D25	-0.543340	2.885033	-0.188331	0.8509
D26	-0.293585	2.762822	-0.106263	0.9155
D27	-0.468540	2.548922	-0.183819	0.8544
D28	-0.239110	2.448747	-0.097646	0.9224
D29	-0.428627	2.473938	-0.173257	0.8627
D30	-0.340556	2.884440	-0.118067	0.9062
D31	-0.465204	2.072760	-0.224437	0.8228
D32	-0.369384	2.874057	-0.128524	0.8979
D33	-0.503075	2.828963	-0.177830	0.8591
D34	-0.401713	2.929371	-0.137133	0.8911
C	0.821866	2.850766	0.288297	0.7736
RESID(-1)	-0.138762	0.093624	-1.482122	0.1407
RESID(-2)	-0.231046	0.105028	-2.199857	0.0295
R-squared	0.047949	Mean dependent var	1.99E-15	
Adjusted R-squared	-0.236245	S.D. dependent var	0.962702	
S.E. of regression	1.070396	Akaike info criterion	3.175559	
Sum squared resid	153.5301	Schwarz criterion	3.917023	
Log likelihood	-236.8614	Hannan-Quinn criter.	3.476318	
F-statistic	0.168720	Durbin-Watson stat	2.095052	
Prob(F-statistic)	1.000000			

### HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS (*White Test*)

Heteroskedasticity Test: White				
F-statistic	0.898550	Prob. F(38,136)	0.6398	
Obs*R-squared	35.11924	Prob. Chi-Square(38)	0.6034	
Scaled explained SS	18.14040	Prob. Chi-Square(38)	0.9974	
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID^2				
Method: Least Squares				
Date: 07/22/10 Time: 14:10				
Sample: 1 175				
Included observations: 175				
	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.961478	3.397920	0.871556	0.3850
Y^2	-0.003491	0.014241	-0.245155	0.8067
U^2	3.47E-12	1.72E-12	2.022162	0.0451
PD^2	-1.20E-11	1.31E-11	-0.919566	0.3594
P^2	-0.001166	0.004841	-0.240760	0.8101
D1^2	-0.657447	3.244840	-0.202613	0.8397
D2^2	-2.078244	2.876339	-0.722531	0.4712
D3^2	-2.735355	3.464949	-0.789436	0.4312
D4^2	-2.529429	3.464093	-0.730185	0.4665
D5^2	-2.743836	3.349822	-0.819099	0.4142
D6^2	-1.751379	3.429106	-0.510739	0.6104
D7^2	-2.581307	3.521073	-0.733102	0.4648
D8^2	-2.112158	3.251968	-0.649501	0.5171
D9^2	-2.286579	3.322935	-0.688120	0.4925
D10^2	-2.400790	2.736265	-0.877397	0.3818
D11^2	-2.397263	3.092502	-0.775185	0.4396
D12^2	-2.406690	3.439758	-0.699668	0.4853
D13^2	-2.338951	3.359758	-0.696166	0.4875
D14^2	-1.131229	3.403919	-0.332331	0.7402
D15^2	-1.713622	3.406898	-0.502986	0.6158
D16^2	-2.897431	3.480471	-0.832482	0.4066
D17^2	-2.725165	3.518179	-0.774595	0.4399
D18^2	-2.472310	3.236811	-0.763810	0.4463
D19^2	-3.063488	3.403442	-0.900115	0.3697
D20^2	-2.703560	3.363204	-0.803865	0.4229
D21^2	-2.473647	3.406647	-0.726124	0.4690
D22^2	-3.050786	3.342402	-0.912753	0.3630
D23^2	-2.957957	3.488277	-0.847971	0.3979
D24^2	-3.085743	3.423351	-0.901381	0.3690
D25^2	-2.278888	3.515157	-0.648303	0.5179
D26^2	-2.012086	3.499340	-0.574990	0.5662
D27^2	-2.540776	3.403773	-0.746459	0.4567
D28^2	-2.578819	3.361647	-0.767130	0.4443
D29^2	-2.539028	3.366027	-0.754310	0.4520
D30^2	-1.921677	3.511213	-0.547297	0.5851
D31^2	-2.661563	3.110914	-0.855557	0.3937
D32^2	-2.325206	3.526252	-0.659399	0.5108
D33^2	-3.123112	3.506416	-0.890685	0.3747
D34^2	-2.716157	3.536219	-0.768097	0.4438
R-squared	0.200681	Mean dependent var	0.921500	
Adjusted R-squared	-0.022658	S.D. dependent var	1.208661	
S.E. of regression	1.222277	Akaike info criterion	3.432892	
Sum squared resid	203.1789	Schwarz criterion	4.138187	
Log likelihood	-261.3781	Hannan-Quinn criter.	3.718980	
F-statistic	0.898550	Durbin-Watson stat	2.715877	
Prob(F-statistic)	0.639770			

**HASIL UJI NORMALITAS (*J-B* Test)**

## HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS (*Auxiliary Regression*)

### VARIABEL DEPENDENT Y

Dependent Variable: Y				
Method: Least Squares				
Date: 06/26/10 Time: 23:37				
Sample: 1 175				
Included observations: 175				
	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
U	3.02E-06	1.36E-06	2.226346	0.0276
PD	2.46E-06	5.25E-06	0.469571	0.6394
P	0.106399	0.062037	1.715074	0.0886
D1	0.937747	1.942142	0.482842	0.6300
D2	0.301693	1.570063	0.192154	0.8479
D3	1.242438	2.289653	0.542632	0.5883
D4	0.761731	2.308945	0.329905	0.7420
D5	-0.198653	2.092526	-0.094934	0.9245
D6	1.770944	2.211399	0.800825	0.4246
D7	0.046649	2.470657	0.018881	0.9850
D8	1.088681	1.939691	0.561265	0.5755
D9	0.768762	2.034683	0.377829	0.7061
D10	0.228960	1.455254	0.157333	0.8752
D11	0.618015	1.770237	0.349114	0.7275
D12	0.830831	2.246531	0.369828	0.7121
D13	2.223993	2.056721	1.081329	0.2815
D14	1.563343	2.154843	0.725502	0.4694
D15	0.675478	2.187260	0.308824	0.7579
D16	0.817518	2.323986	0.351774	0.7255
D17	1.021037	2.464772	0.414252	0.6793
D18	-0.365399	1.929271	-0.189398	0.8501
D19	1.382363	2.130898	0.648723	0.5176
D20	0.888469	2.092348	0.424628	0.6718
D21	0.124646	2.179887	0.057180	0.9545
D22	-0.134559	2.069916	-0.065007	0.9483
D23	0.713895	2.365811	0.301755	0.7633
D24	-0.227759	2.195595	-0.103735	0.9175
D25	-0.785001	2.465374	-0.318410	0.7507
D26	0.770512	2.368639	0.325297	0.7455
D27	0.248886	2.178747	0.114234	0.9092
D28	1.412003	2.092609	0.674757	0.5010
D29	1.192318	2.113036	0.564268	0.5735
D30	0.219509	2.465590	0.089029	0.9292
D31	1.787419	1.763791	1.013396	0.3127
D32	0.335139	2.452106	0.136674	0.8915
D33	0.124430	2.416916	0.051483	0.9590
D34	1.695744	2.499627	0.678399	0.4987
C	1.107142	2.438925	0.453947	0.6506
R-squared	0.480308	Mean dependent var		4.171285
Adjusted R-squared	0.339953	S.D. dependent var		1.135339
S.E. of regression	0.922387	Akaike info criterion		2.865776
Sum squared resid	116.5592	Schwarz criterion		3.552987
Log likelihood	-212.7554	Hannan-Quinn criter.		3.144529
F-statistic	3.422097	Durbin-Watson stat		1.865960
Prob(F-statistic)	0.000000			

### VARIABLE DEPENDENT U

Dependent Variable: U				
Method: Least Squares				
Date: 06/26/10 Time: 23:39				
Sample: 1 175				
Included observations: 175				
	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Y	11564.95	5194.588	2.226346	0.0276
PD	1.988026	0.276969	7.177796	0.0000
P	15356.04	3652.070	4.204751	0.0000
D1	665540.6	106018.0	6.277619	0.0000
D2	566750.1	84265.01	6.725806	0.0000
D3	868692.2	120898.7	7.185290	0.0000
D4	858297.3	122720.9	6.993898	0.0000
D5	769106.3	111606.3	6.891242	0.0000
D6	838490.0	116996.4	7.166800	0.0000
D7	970483.6	128481.1	7.553514	0.0000
D8	718125.6	103348.1	6.948610	0.0000
D9	769883.5	107462.6	7.164202	0.0000
D10	512762.7	78704.78	6.515014	0.0000
D11	622083.4	95863.49	6.489263	0.0000
D12	835023.8	119423.8	6.992105	0.0000
D13	772949.7	109457.0	7.061678	0.0000
D14	819232.6	113824.1	7.197357	0.0000
D15	813515.9	116222.5	6.999644	0.0000
D16	905048.2	121359.2	7.457596	0.0000
D17	923356.8	130677.7	7.065907	0.0000
D18	733159.4	101674.7	7.210836	0.0000
D19	821634.5	111889.1	7.343295	0.0000
D20	812405.9	109426.9	7.424188	0.0000
D21	823332.7	115129.1	7.151388	0.0000
D22	811096.8	107752.2	7.527424	0.0000
D23	900686.6	124629.4	7.226920	0.0000
D24	867917.9	113879.8	7.621354	0.0000
D25	919680.1	130864.8	7.027711	0.0000
D26	899120.6	124926.7	7.197184	0.0000
D27	794381.4	116528.2	6.817073	0.0000
D28	731926.1	113663.2	6.439431	0.0000
D29	746898.6	114327.4	6.532978	0.0000
D30	857476.8	133868.2	6.405381	0.0000
D31	615487.6	96128.93	6.402731	0.0000
D32	845742.3	133470.5	6.336550	0.0000
D33	844845.1	131020.6	6.448184	0.0000
D34	855883.9	136627.4	6.264367	0.0000
C	-730847.7	137552.7	-5.313218	0.0000
R-squared	0.509344	Mean dependent var		445020.6
Adjusted R-squared	0.376831	S.D. dependent var		72316.79
S.E. of regression	57087.62	Akaike info criterion		24.93204
Sum squared resid	4.46E+11	Schwarz criterion		25.61925
Log likelihood	-2143.554	Hannan-Quinn criter.		25.21080
F-statistic	3.843734	Durbin-Watson stat		1.967766
Prob(F-statistic)	0.000000			

### VARIABEL DEPENDENT PD

Dependent Variable: PD				
Method: Least Squares				
Date: 06/26/10 Time: 23:40				
Sample: 1 175				
Included observations: 175				
	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Y	652.3946	1389.341	0.469571	0.6394
U	0.137468	0.019152	7.177796	0.0000
P	242.5877	1020.225	0.237779	0.8124
D1	-353027.5	9543.602	-36.99101	0.0000
D2	-274742.0	10106.48	-27.18474	0.0000
D3	-418352.0	10680.61	-39.16932	0.0000
D4	-423671.2	10149.79	-41.74185	0.0000
D5	-380642.1	10113.60	-37.63664	0.0000
D6	-401185.1	11249.55	-35.66233	0.0000
D7	-451041.4	11483.62	-39.27692	0.0000
D8	-350065.9	10215.22	-34.26905	0.0000
D9	-367957.4	10460.89	-35.17459	0.0000
D10	-251451.4	9976.083	-25.20542	0.0000
D11	-317889.6	9651.995	-32.93512	0.0000
D12	-410634.5	10359.20	-39.63959	0.0000
D13	-372874.5	10730.49	-34.74908	0.0000
D14	-390785.1	10951.10	-35.68456	0.0000
D15	-398186.6	10523.45	-37.83801	0.0000
D16	-422329.4	11398.76	-37.05047	0.0000
D17	-453715.3	10417.89	-43.55154	0.0000
D18	-347163.6	10315.52	-33.65450	0.0000
D19	-387992.5	10372.55	-37.40571	0.0000
D20	-378117.4	10840.70	-34.87942	0.0000
D21	-398540.4	9965.123	-39.99353	0.0000
D22	-374879.3	10444.91	-35.89109	0.0000
D23	-432580.8	10844.77	-39.88842	0.0000
D24	-399556.4	10566.97	-37.81182	0.0000
D25	-454997.1	9999.648	-45.50132	0.0000
D26	-435411.4	10167.78	-42.82266	0.0000
D27	-399304.4	9676.152	-41.26686	0.0000
D28	-383011.7	9640.913	-39.72774	0.0000
D29	-386830.2	9650.806	-40.08268	0.0000
D30	-455697.5	9722.194	-46.87188	0.0000
D31	-317473.3	9720.910	-32.65880	0.0000
D32	-452715.2	9841.563	-46.00033	0.0000
D33	-446085.7	9735.447	-45.82077	0.0000
D34	-463336.3	9669.976	-47.91494	0.0000
C	440907.7	12607.57	34.97167	0.0000
R-squared	0.975750	Mean dependent var		124964.7
Adjusted R-squared	0.969201	S.D. dependent var		85538.78
S.E. of regression	15011.76	Akaike info criterion		22.26054
Sum squared resid	3.09E+10	Schwarz criterion		22.94775
Log likelihood	-1909.797	Hannan-Quinn criter.		22.53929
F-statistic	148.9873	Durbin-Watson stat		2.072952
Prob(F-statistic)	0.000000			

**VARIABEL DEPENDENT P**

Dependent Variable: P				
Method: Least Squares				
Date: 06/26/10 Time: 23:54				
Sample: 1 175				
Included observations: 175				
	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Y	0.197552	0.115186	1.715074	0.0886
U	7.44E-06	1.77E-06	4.204751	0.0000
PD	1.70E-06	7.15E-06	0.237779	0.8124
D1	0.962819	2.647363	0.363690	0.7167
D2	-2.568351	2.128397	-1.206707	0.2296
D3	-3.906157	3.105384	-1.257866	0.2106
D4	-2.424661	3.140626	-0.772031	0.4414
D5	-1.765688	2.847406	-0.620104	0.5362
D6	-5.052688	2.989320	-1.690247	0.0933
D7	-4.970111	3.339670	-1.488205	0.1390
D8	-2.928790	2.634229	-1.111821	0.2682
D9	-3.464161	2.758097	-1.255997	0.2113
D10	-2.172826	1.974421	-1.100488	0.2730
D11	-0.732489	2.412411	-0.303634	0.7619
D12	-2.997255	3.051959	-0.982076	0.3278
D13	-4.055286	2.793044	-1.451923	0.1488
D14	-4.548550	2.916074	-1.559820	0.1211
D15	-3.340057	2.967741	-1.125454	0.2624
D16	-5.211826	3.136678	-1.661575	0.0989
D17	-3.106201	3.350140	-0.927185	0.3555
D18	-2.576655	2.619964	-0.983470	0.3271
D19	-3.410116	2.893417	-1.178577	0.2406
D20	-4.351682	2.828609	-1.538453	0.1262
D21	-1.739250	2.966660	-0.586265	0.5587
D22	-3.090710	2.808152	-1.100621	0.2730
D23	-4.037459	3.206256	-1.259244	0.2101
D24	-3.243416	2.979006	-1.088758	0.2782
D25	-0.157314	3.360569	-0.046812	0.9627
D26	-2.587717	3.221209	-0.803337	0.4232
D27	-0.391837	2.968743	-0.131988	0.8952
D28	-0.361943	2.855985	-0.126731	0.8993
D29	-0.546955	2.882217	-0.189769	0.8498
D30	2.003171	3.355383	0.597002	0.5515
D31	-0.955444	2.410976	-0.396289	0.6925
D32	3.063562	3.331235	0.919648	0.3594
D33	2.285323	3.287563	0.695142	0.4881
D34	1.840786	3.408117	0.540118	0.5900
C	4.477702	3.303737	1.355345	0.1775
R-squared	0.817529	Mean dependent var		6.811260
Adjusted R-squared	0.768249	S.D. dependent var		2.610807
S.E. of regression	1.256857	Akaike info criterion		3.484586
Sum squared resid	216.4175	Schwarz criterion		4.171797
Log likelihood	-266.9013	Hannan-Quinn criter.		3.763338
F-statistic	16.58932	Durbin-Watson stat		2.465761
Prob(F-statistic)	0.000000			